

PERKEMBANGAN SEKOLAH PARTIKELIR PAKUALAMAN 1892-1942

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta Untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sastra**



**Oleh:
Ninda Purnama Sari
07407141006**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2012**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “Perkembangan Sekolah Partikelir Pakualaman 1892-1942” telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.



Yogyakarta, 06 Juli 2012

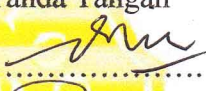



Pembimbing

Ririn Darini, M. Hum
NIP. 19741118 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Perkembangan Sekolah Partikelir Pakualaman 1892-1942” telah dipertahankan di depan Dewan Penguji skripsi dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sastra.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dina Dwikurniarini, M. Hum	Ketua Penguji		2/8 12
Danar Widiyanta, M. Hum	Penguji Utama		29/7 12
Miftahuddin, M. Hum	Sekretaris		30/7 12
Ririn Darini, M. Hum	Anggota		3/8 12

Yogyakarta, 2012

Dekan FIS

Universitas Negeri Yogyakarta



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag
NIP. 19620321 198903 1 001

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Ninda Purnama Sari

NIM : 07407141006

Judul : Perkembangan Sekolah Partikelir Pakualaman 1892-1942

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan karya penulis. Sepanjang pengetahuan penulis, skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau digunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penulis gunakan sebagai sumber penulisan.

Pernyataan ini oleh penulis dibuat dengan penuh kesadaran dan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ternyata tidak benar maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 06 Juli 2012

Penulis



Ninda Purnama Sari
NIM. 07407141006

MOTTO

Selalu berusaha menjadi lebih baik,

Dengan penuh tekad dari waktu ke waktu,

Berangkat dengan penuh keyakinan,

Berjalan dengan keiklasan.

Istiqomah dalam menghadapi cobaan,

Dan tidak lupa bersyukur pada Tuhan

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk Alm. Bapak, Ibu dan keluarga, terima kasih
atas semuanya, tanpa kalian saya bukan apa-apa.

ABSTRAK

PERKEMBANGAN SEKOLAH PARTIKELIR PAKUALAMAN 1892-1942

OLEH:
NINDA PURNAMA SARI
NIM: 07407141006

Dengan di berlakukannya Politik Etis oleh Pemerintah Belanda di wilayah Hindia Belanda, sedikit-demi sedikit terdapat perbaikan dalam bidang pendidikan. Sekolah dengan sistem Barat banyak didirikan di wilayah Indonesia terutama di Yogyakarta. Pakualaman juga telah mendirikan tiga buah sekolah partikelir yang menggunakan sistem Barat, ketiga sekolah tersebut, dua di antaranya berada di wilayah Pakualaman yang di Yogyakarta, yang satunya di wilayah Adikarto. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang keadaan geografis, demografis, dan pendidikan di wilayah Pakualaman, beserta sekolah partikelir yang didirikan oleh Pakualaman beserta dampaknya bagi masyarakat.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis melalui studi pustaka. Metode yang digunakan melalui langkah-langkah sebagai berikut. **Pertama**, *heuristik*, pengumpulan sumber-sumber yang menyangkut peristiwa sejarah yang akan di tulis. **Kedua**, *kritik sumber*, yaitu kegiatan meneliti sumber-sumber sejarah baik secara eksternal maupun internal yang meliputi kelayakan sumber tersebut untuk dijadikan data dalam penulisan. **Ketiga**, *interpretasi*, yaitu penafsiran makna yang saling berhubungan dari sumber-sumber sejarah yang diperoleh setelah melakukan kritik intern dan ekstern dari data-data yang berhasil dikumpulkan agar penulisan lebih lengkap dan lebih bersifat obyektif. **Keempat**, *penulisan*, yaitu penulisan dan penyampaian rangkuman sumber-sumber yang diperoleh dalam bentuk karya sejarah.

. Dari kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa daerah Pakualaman meliputi sebagian kecil wilayah Yogyakarta yang berada di timur sungai Code, ditambah dengan kabupaten Brosot yang ada di Adikarto, Kulon Progo. Pakualaman mempunyai cukup padat penduduk dengan penduduk yang banyak bermatapencaharian dibidang pertanian. Perkembangan pendidikan di Pakualaman dapat dilihat dengan didirikannya tiga sekolah partikelir oleh Pakualaman. Sekolah tersebut dinamakan sekolah Surjengyuritan Lor, Padmosekarnan dan sekolah Ongko Loro. Sekolah Ongko Loro yang didirikan di Adikarto khusus disediakan untuk anak-anak dari para pegawai Pakualaman.

Kata Kunci: Sekolah, Partikelir, Pakualaman

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan iman dan Islam. Sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW, pembawa risalah dan rahmah. Penulisan skripsi berjudul “Perkembangan Sekolah Partikelir Pakualaman 1892-1942” tidak lepas dari bimbingan dan bantuan segenap pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih dengan segala ketulusan hati atas keikhlasan pihak-pihak tersebut dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut.

1. Bapak Prof. Dr. Rochmad Wahab. M.Pd, MA selaku rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak M. Nur Rokhman, M.Pd, Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Bapak H.Y. Agus Murdiyastomo, M.Hum selaku Koordinator Program Studi Ilmu Sejarah yang telah mendorong penulis untuk segera menyelesaikan studi.
5. Ibu Ririn Darini, M.Hum selaku pembimbing skripsi. Terimakasih atas segala bentuk dukungan baik material maupun moral, memperbaiki dan memberikan solusi terutama dalam penulisan sekolah partikelir.
6. Ibu Dina Dwikurniarini, M.Hum selaku penasehat akademik dan juga sebagai ketua penguji. Terimakasih atas bantuan dan pengarahan selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

7. Bapak Danar Widiyanta, M.Hum selaku Penguji Utama terimakasih telah memberikan kritik dan saran yang bertujuan membangun dan memperbaiki penulisan skripsi.
8. Bapak Miftahudin, M.Hum selaku sekretaris merangkap penguji. Terimakasih telah menyediakan waktu dan pikiran untuk menguji dan memperbaiki penulisan skripsi.
9. Bapak dan Ibu dosen Pendidikan Sejarah dan dosen Ilmu Sejarah. Terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada kami. Semoga menjadi amal jariyah bagi bapak ibu.
10. Pustakawan FIB UGM, PUSDA, Jogja Library, Kolese Ignatius, Arsip Puro Pakualaman. Terimakasih atas bantuannya untuk mempermudah mendapatkan sumber-sumber tentang sekolah partikelir.
11. Bapak Narto dan Pak Tamdaru. Terimakasih atas waktu yang diberikan dan bimbingannya untuk mencari arsip sekolah partikelir Pakualaman.
12. Kedua orangtua, Alm. Suji Harsono dan Sarni. Terimakasih atas doa dan kepercayaan bapak ibu yang telah diberikan kepada saya.
13. Kakak-kakak ku Ari, Ana, Iyun, Feri, Erma dan adik ku Khorin. Terimakasih semangat dan dukungan yang selalu diberikan.
14. Teman-teman Ilmu Sejarah 2007 Anas, Edo, Altav, Agung, Wisnu, Fatah, Edwin, Septi, Desi, Shintia, Dwi, Gilang, Gufron, Eko, Ardi, Arfin, Dana, Ari, Uni, Ike, Dana. Terimakasih telah mengenalkan dan mengajarkan banyak hal selama kuliah

15. Andri Budiirawan, terimakasih atas semua bantuan, dukungan dan semangat yang selalu diberikan.

16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan yang telah diberikan, semoga bermanfaat.

Demi menyempurnakan tulisan ini, penulis perlu sumbangan kritik dan saran dari berbagai pihak. Penulis mohon maaf atas segala kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga karya ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 06 Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR ISTILAH	xvi
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Historiografi yang Relevan	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Pendekatan Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan.....	20
 BAB II. PAKUALAMAN TAHUN 1892-1942	 22
A. Keadaan Geografis.....	22
B. Keadaan Demografis	28
C. Pendidikan Masyarakat	38
 BAB III. SEKOLAH PARTIKELIR DI PAKUALAMAN.....	 46
A. Awal Berdiri Sekolah Partikelir.....	46
B. Sekolah Partikelir Pakualaman	53
C. Suasana Belajar di Sekolah Partikelir Pakualaman.....	57
1. Gedung Sekolah	57
2. Peralatan Sekolah	58
3. Buku Pelajaran	58
4. Daftar Pelajaran	61

5. Para Guru	62
6. Jumlah Murid	62
7. Uang Sekolah	63
8. Gaji Guru	63
D. Perkembangan Sekolah Partikelir Pakualaman	65
E. Pengawasan Sekolah.....	66

**BAB IV. PENGARUH SEKOLAH PARTIKELIR PAKUALAMAN
TAHUN 1892-194274**

A. Pengaruh Bidang Sosial	76
B. Pengaruh Bidang Ekonomi	84
C. Pengaruh Bidang Kebudayaan	86

BAB V. KESIMPULAN90
DAFTAR PUSTAKA94
LAMPIRAN.....98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Landasan Idiil jaman Pemerintahan Hindia Belanda	98
2. Sistem Sekolah jaman Hindia Belanda	99
3. Isi Perjanjian Giyanti.....	100
4. Silsilah Keluarga Trah Pakualaman	103
5. Isi Kontrak Politik antara Paku Alam I dan Gubernemen Inggris 17 Maret 1813	104
6. Peta Daerah Pakualaman.....	107
7. Denah Puro Pakualaman	108
8. Arsip Pakualaman tentang Biaya Sekolah di Pakualaman.....	109
9. Arsip Pakualaman tentang Gaji Guru di Pakualaman.....	110
10. Ordonasi Pengawasan Sekolah Partikelir.....	111
11. Pembagian Penduduk Masa Kekuasaan Pemerintah Belanda.....	112

DAFTAR SINGKATAN

ELS	:	Europeesche Lagere School
HBS	:	Hoogere Burger School
HIS	:	Hollandsch Inlandsche School
KGPAA	:	Kanjeng Gusti Pangeran Adi Aryo
SR	:	Sekolah Rakyat
PB. IV	:	Paku Buwono IV
VOC	:	Vereenigde Oost-indische Compagnie

DAFTAR ISTILAH

Adipati	: Gelar untuk raja muda dan wakil raja yang biasanya digunakan di lingkungan kerajaan Pakualaman dan Mangkunegaraan.
De Facto	: Pengakuan kedaulatan suatu negara oleh bangsa-bangsa lain secara riil (kenyataannya).
De Jure	: Pengakuan kedaulatan suatu negara oleh bangsa-bangsa lain secara hukum.
Ekonomi Subsistensi	: Suatu perekonomian yang di dalamnya merupakan suatu usaha yang menghasilkan barang-barang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari mereka sendiri, yang banyak dilakukan oleh masyarakat saat belum mengenal ekonomi uang.
Ekonomi Tertutup	: Perekonomian yang menggunakan hasil dari lahan mereka (petani) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terpengaruh dengan kebudayaan perekonomian lainnya seperti ekonomi uang, mereka juga masih menggunakan sistem tukar menukar barang, menggunakan suatu barang sebagai alat pengganti uang.
Ekonomi Uang	: Suatu sistem perekonomian memberlakukan dan menggunakan uang sebagai alat untuk proses jual beli yang menggantikan pertukaran barang pada sistem perekonomian sebelumnya.
Gubernemen	: Sebutan untuk Pemerintah Hindia Belanda yang sedang berkuasa di wilayah Yogyakarta.

Kweekeling (kweekschool)	: Sebuah sekolah untuk calon guru yang didirikan oleh VOC pada masa Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia.
Ladang Berpindah	: Penggunaan lahan yang ada di hutan dengan membersihkan ladang tersebut terlebih dahulu setelah itu baru bisa ditanami, setelah ladang tersebut dianggap sudah tidak produktif lagi, mereka akan berpindah mencari tempat (lahan) untuk dijadikan ladang baru yang lebih produktif.
Legion	: Jabatan untuk seorang tentara pada masa Pemerintahan Hindia Belanda.
Politik Etis	: Suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dan kemudian diberlakukan di wilayah Indonesia, yang isinya meliputi edukasi, transmigrasi dan irigasi.
Sekolah Ongko Loro	: Sekolah dasar tingkat rendahan (Loro) yang didirikan oleh Pemerintah Belanda dan diperuntukkan untuk masyarakat yang berasal dari lapisan bawah.
Sekolah Partikelir	: Sekolah yang didirikan oleh pihak swasta tanpa ada campur tangan dari pemerintah.
Vorstenlanden	: Istilah dan sebutan suatu daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Kolonial Belanda, namun pemerintah daerah itu sendiri diberi wewenang untuk mengatur daerah kekuasaan mereka masing-masing walaupun tetap dalam pengawasan dari Pemerintah Kolonial Belanda.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir abad ke-19, mulai muncul perhatian terhadap orang pribumi. Politik kolonial Belanda berkembang menuju gagasan yang menyatakan bahwa politik kolonial tidak boleh lagi hanya bersandar sepenuhnya pada prinsip-prinsip ekonomi liberal. Pada awal abad ke-19, kebijakan Pemerintah Belanda pun mulai berubah.¹ Eksploitasi terhadap Indonesia mulai berkurang. Kebijakan ini kemudian dinamakan sebagai “politik etis”² dan pertama kali dikemukakan oleh Van Deventer melalui majalah *De Gids*³ dalam artikel berjudul “Een Eereschuld”.⁴ Indonesia mengalami perubahan dalam bidang pendidikan setelah dilaksanakannya politik etis pada awal abad ke-19 oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Politik ini pada kenyataannya memang telah memunculkan banyak kemajuan karena Pemerintah Hindia Belanda tidak dapat menghalangi hak bangsa

¹ Djumhur, *Sejarah Pendidikan*, (Bandung : CV ILMU, 1994), hlm. 135.

² Lihat Lampiran Nomer 01, hlm. 98.

³ Majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah Belanda di wilayah Belanda, yang dalam salah satu artikelnya memuat sikap dari Pemerintah Kolonial Belanda yang dianggap tidak mempunyai rasa kemanusiaan.

⁴ Hutang kehormatan Pemerintah Kolonial Belanda kepada Indonesia karena dengan menjajah bangsa Indoonesia, Belanda telah mendapatkan banyak keuntungan. Sudah seharusnya pemerintah kolonial Belanda membalasnya dengan perlakuan baik, dan bukan justru malah selalu menyiksa mereka (masyarakat Indonesia)

Indonesia untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan.⁵ Pemerintah kolonial pun mulai mendirikan sekolah-sekolah di bumi Nusantara.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam pelaksanaan Politik Etis, tentu tidak ada satupun yang utuh ditujukan bagi kepentingan masyarakat pribumi. Semua kebijakan yang ada tampaknya hanya dibuat demi kepentingan mereka sendiri, termasuk dalam bidang pengajaran. Pengadaan pengajaran hanya diluncurkan sekadar untuk mengikuti perkembangan perekonomian pada masa itu. Upaya perluasan dalam bidang pemerintahan dan pelayanan administrasi telah memunculkan kebutuhan akan tenaga kerja, baik dalam bidang administrasi, bidang teknik, maupun bidang kejuruan.

Perkembangan pengajaran dengan sistem sekolahnya, mau tidak mau, harus disesuaikan dengan sifat dualistis masyarakat Indonesia pada masa itu.⁶ Hal ini mencakup juga pada bahasa pengantar yang digunakan maupun sistem pengajaran yang dipakai.⁷ Pada masa itu, terdapat empat kategori sekolah:

1. Sekolah Eropa, yang sepenuhnya memakai model sekolah di Negeri Belanda.
2. Sekolah bagi pribumi yang memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya.

⁵ Amir Sutarga, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, (Jakarta : yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm.176.

⁶ Djumhur, *loc.cit.*,

⁷ Sistem Sekolah Jaman Hindia Belanda lihat lampiran Nomer 02, hlm. 99.

3. Sekolah bagi pribumi yang memakai bahasa daerah atau pribumi sebagai bahasa pengantarnya.
4. Sekolah yang memakai sistem pribumi.⁸

Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda itu awalnya hanya terbatas sampai tingkat rendah. Namun, pada awal abad ke-20, mulai dibuka sekolah tingkat menengah dan sekolah tingkat tinggi pada tahun 1920-an. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda ini telah mendorong beberapa tokoh/golongan terpelajar untuk berusaha memajukan pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, masih terdapat diskriminasi dalam pelaksanaannya, di samping sifat-sifat lembaga pendidikannya yang terlalu elite. Inilah yang menyebabkan perkembangan sistem pendidikan di Indonesia berjalan dengan sangat lambat.

Pendidikan yang hanya diperuntukkan bagi kalangan bangsawan dan kelas menengah ke atas inilah yang telah memunculkan keadaan yang bertolak belakang pada masyarakat kelas bawah.⁹ Biaya untuk pendidikan pada saat itu dirasa terlalu mahal sehingga kemiskinan dan kebodohan masih menyelimuti bangsa Indonesia. Usaha pengajaran baru mulai mendapat perhatian dari pemerintah ketika Mullemeister menjabat residen (1882-1891). Para guru terdiri dari *kweekeling*¹⁰

⁸Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional*, (Jakarta : PT Gramedia, 1990), hlm. 76

⁹ Abdurrachman Surjomihardjo, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe : Sejarah Sosial 1880 – 1930*, (Jakarta: Komunitas Bambu. 2008), hlm. 65.

¹⁰*Kweekschool* merupakan sekolah untuk calon guru yang didirikan oleh VOC pada masa Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia.

yang berasal dari *Opleidingschool voor Inlandsche Onderwijzers* di Probolinggo.¹¹

Kebijakan politik etis mulai diberlakukan di beberapa wilayah Indonesia, terutama di Jawa. Hal ini karena Jawa merupakan pusat dari wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, terutama di kawasan ibu kota kerajaan dan sekitarnya. Pengembangan pendidikan itu juga tidak bisa dilepaskan dari peran serta dari para kaum cendekia yang masih peduli dengan nasib pendidikan di Indonesia. Mereka membuka sekolah-sekolah rakyat untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia.¹² Perkembangan pendidikan dan pengajaran sampai akhir abad ke-19 menunjukkan kecenderungan yang dipengaruhi oleh politik pendidikan pada khususnya dan politik kebudayaan pada umumnya.¹³ Hal ini disebabkan oleh:

- a. Sesuai dengan aliran liberalisme yang masih sangat kuat pengaruhnya di Nederland, pengajaran yang diselenggarakan oleh *gubernemen* harus

¹¹ Abdurrachman Surjomihardjo. *op.cit.* hlm. 68.

¹² Sutedjo Bradjanagara, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Jogjakarta : Kongres Pendidikan Indonesia, 1956), hlm. 65.

¹³ Politik Pendidikan dan Politik Kebudayaan merupakan suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah yang mempengaruhi bidang pendidikan dan kebudayaan masyarakat. Seperti mulai bermunculan sekolah yang didirikan pemerintah dengan sistem Barat dan banyaknya masyarakat yang kebudayaannya mulai terpengaruh dengan kebudayaan yang kebarat-baratan, (Suryosubroto, *Beberapa Aspek Dasar-dasar Kependidikan*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1982.), hlm. 39).

bersifat netral. Ini artinya pengajaran tidak didasarkan atas aliran agama tertentu sehingga pengajaran agama tidak diberikan.

- b. Politik bahasa yang ditempuh juga lebih memperhatikan prinsip kebudayaan dan kesukarelaan, yaitu dalam penyelenggaraan pelajaran bahasa Belanda dalam rangka menanggapi minat besar terhadap penguasaan bahasa ini di kalangan pribumi, terutama di lingkungan aristokrasi. Hal ini tampak pada keengganan pemerintah kolonial untuk memasukkan mata pelajaran bahasa Belanda dalam kurikulum sekolah.
- c. Sejak semula, pembukaan sekolah-sekolah lebih banyak didorong oleh kebutuhan praktis yang berhubungan dengan pekerjaan di berbagai bidang atau dalam berbagai kejuruan.
- d. Ada gagasan kuat agar sekolah pribumi lebih berakar pada lingkungan kebudayaannya sendiri, maka bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa daerah masing-masing.¹⁴

Pada saat itu, secara perlahan masyarakat Indonesia mulai mengenal dan mengenyam bangku pendidikan. Walaupun begitu, tidak semua masyarakat Indonesia memiliki nasib yang cukup beruntung. Hanya kaum elite (kaum yang berada dan merupakan keturunan ningrat) saja yang bisa mendapatkan

¹⁴ Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 (Dari Emporium Sampai Imperium)*. (Jakarta: Gramedia. 1987), hlm. 353.

pendidikan. Hal ini dikarenakan biaya sekolah yang masih tinggi sehingga tidak semua kalangan masyarakat bisa menjangkaunya.¹⁵

Pelaksanaan politik etis dalam kenyataannya juga tidak berjalan sesuai rencana. Program irigasi, transmigrasi, dan edukasi telah menyimpang dari tujuan awalnya. Namun, politik etis dalam bidang edukasi telah memunculkan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia yang kemudian turut berjasa besar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Karena merekalah dunia pendidikan di Indonesia kemudian mengalami perkembangan yang sangat pesat pada 1940-an. Para bangsawan dan golongan terpelajar bahkan mampu mendapatkan pendidikan hingga ke luar negeri dengan harapan agar dapat lebih banyak menyumbang ilmu dalam dunia pendidikan di Indonesia.¹⁶

Keluarga Pakualaman juga menunjukkan kepedulian terhadap kekurangan sekolah yang ada. Awalnya, putra-putri kerabat Pakualaman dikirim ke sekolah di Solo yang dilanjutkan hingga ke Perguruan Tinggi di Eropa, yang menggunakan sistem pendidikan Eropa. Setelah para putra-putri dari Pakualaman yang telah menempuh pendidikan hingga ke luar negeri itu kembali, mereka kemudian berinisiatif untuk mendirikan sekolah partikelir di wilayah Pakualaman.¹⁷ Semua

¹⁵Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan di Indonesia*, (Jakarta : INIS, 2004), hlm.30.

¹⁶*Ibid*, hlm. 195

¹⁷Kata partikelir berasal dari kata “private” yang berarti berdiri sendiri tanpa bantuan pihak lain. Sekolah Partikelir merupakan sekolah yang didirikan oleh suatu lembaga atau yayasan yang seluruhnya bukan tanggungan dari pemerintah. Biasanya sekolah tersebut muncul karena kurangnya sekolah-sekolah yang disediakan oleh pemerintah untuk anak-anak pribumi. Selain dapat menambah jumlah sekolah yang ada, sekolah partikelir juga mampu

kebutuhan sekolah tersebut dibiayai oleh pihak Pakualaman, walaupun dalam perkembangannya pemerintah kolonial mulai ikut campur dalam masalah biaya untuk sekolah ini.¹⁸ Sekolah tersebut dinamakan Surjengdjuritan Lor yang terletak di dalam wilayah Pakualaman di pendopo Kanjeng Pangeran Surjurud, dan sekolah partikelir yang dinamakan Padmosekarnan yang berada di dalam perkampungan Gunung Ketur. Selain yang ada di wilayah dalam kota Pakualaman, juga terdapat sekolah partikelir yang ada di luar kota Pakualaman, yaitu yang ada di wilayah Adikarto. Sekolah tersebut dinamakan sekolah Ongko Loro, sekolah yang dipersiapkan untuk anak-anak dari pegawai Pakualaman.¹⁹

Dalam penulisan skripsi ini, akan menfokuskan pembahasan pada sekolah partikelir yang berdiri di dalam wilayah dan naungan Pakualaman yang meliputi wilayah dalam kota Pakualaman yang dekat dengan kota Yogyakarta maupun yang ada di luar kota seperti di Adikarto. Tema-tema yang akan dibahas mencakup latar belakang dan kemunculan sekolah-sekolah tersebut, perkembangannya, dan akhirnya pada dampak yang ditimbulkan dari adanya sekolah tersebut di kalangan masyarakat sekitar Pakualaman maupun yang ada dalam wilayah Pakualaman itu sendiri.

meningkatkan pendidikan di masyarakat, yang tentu saja dapat mengurangi angka buta huruf.

¹⁸Moch. Tauchid, *Perguruan Partikelir*, (Yogya : Majelis Luhur Persatuan Tamsis, 1955), hlm. 09.

¹⁹Kota Jogjakarta 200 tahun 07 Oktober 1756 - 07 Oktober 1956, Kota Praja Jogjakarta, hlm. 72.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran keadaan geografis, demografis dan pendidikan dalam masyarakat Pakualaman tahun 1892-1942?
2. Mengapa dan bagaimana perkembangan sekolah partikelir Suryengdurijan Lor, Padmosekarman dan sekolah Ongko Loro yang berdiri di wilayah Pakualaman?
3. Bagaimana pengaruh sekolah partikelir yang didirikan di dalam wilayah Pakualaman bagi masyarakat sekitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Usaha dalam rangka menumbuhkembangkan kemampuan dalam berpikir secara logis, kritis, sistematis serta objektif dalam memandang, menilai, dan menganalisis suatu peristiwa sejarah yang sesuai dengan metodologi sejarah yang sudah ditentukan.
- b. Melatih kemampuan dalam rangka penerapan metode sejarah dalam sesuatu permasalahan (peristiwa) sejarah yang dihadapi atau diteliti.
- c. Dapat meningkatkan dan menumbuhkembangkan kemampuan diri dalam menerapkan disiplin ilmu pengetahuan.
- d. Menambah referensi tentang ilmu pengetahuan.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran keadaan geografis, demografis dan pendidikan Pakualaman pada tahun sebelum 1892-1942.

- b. Mengetahui perkembangan sekolah-sekolah partikelir Suryengdurijan Lor, Padmosekarnan dan sekolah Ongko Loro yang ada di wilayah Pakualaman.
- c. Dapat memahami seberapa besar pengaruh sekolah partikelir Suryengdurijan Lor, Padmosekarnan dan sekolah Ongko Loro yang berdiri di wilayah Pakualaman.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pembaca

- a. Pengetahuan tentang keadaan penduduk, lingkungan dan pendidikan Pakualaman pada tahun sebelum 1892-1942 yang diperoleh pembaca jelas.
- b. Dapat menjelaskan dengan rinci tentang perkembangan sekolah partikelir Suryengdurijan Lor, Padmosekarnan dan sekolah Ongko Loro yang berdiri di wilayah Pakualaman.
- c. Pembaca bisa mendapatkan tambahan wawasan yang dimiliki mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari adanya sekolah partikelir Suryengdurijan Lor, Padmosekarnan dan sekolah Ongko Loro yang ada di wilayah Pakualaman.

2. Bagi Penulis

- a. Dapat melatih kemampuan meneliti, menganalisis, dan merekonstruksi suatu peristiwa sejarah yang sedang diteliti.
- b. Pengetahuan dan cakrawala sejarah yang bersifat kritis dan bermanfaat.
- c. Menambah wawasan kesejarahan yang dimiliki.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian sejarah, kajian pustaka sangat diperlukan, karena dengan mengkaji pustaka-pustaka yang ada dapat menambah data-data sebagai referensi yang dibutuhkan demi kelengkapan dan kejelasan hasil dari penelitian yang dilakukan. Awal abad ke-19 mulai diberlakukannya politik etis yang dalam kebijakannya pemerintah kolonial Belanda mulai memperhatikan pendidikan bagi kaum pribumi. Sejak saat itu pemerintah kolonial Belanda berusaha secara politis mendirikan sekolah-sekolah untuk masyarakat Bumi putra tujuannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan industri dan partikelir.²⁰ Pendidikan Hindia Belanda mengalami kemajuan pesat pada 1900, hingga terbentuklah sekolah-sekolah pertikelir yang salah satunya ada di wilayah Pakualaman sendiri.

Letak Pakualaman secara geografis, yaitu wilayah-wilayah yang masih dalam kekuasaan Pakualaman. Daerah-daerah yang dimaksud adalah daerah yang sesuai dengan kehendak Letnan Gubernur Raffles yang terdiri dari kabupaten Brosot dan ditambah sebagian kecil wilayah Ibukota Yogyakarta, yang terletak di timur sungai Code yang menjadi kediaman Sri Paku Alam I. Keadaan masyarakat Pakualaman, yang meliputi kepadatan penduduk, mata pencaharian dan gambaran keadaan pendidikan di wilayah Pakualaman.²¹

²⁰ H. Baudet dan I. J. Brugmans. *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.1987), hlm. 177.

²¹ Poerwokoesoemoe Soedarisman, *Kadipaten Pakualaman*, (Yogyakarta : Gadjah Mada UP, 1985)

Awal munculnya pendidikan di daerah Yogyakarta dengan munculnya beberapa sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini tentu membawa pengaruh di lingkungan kerabat Pakualaman dan masyarakat sekitar Pakualaman, mereka juga mulai mengenal pendidikan. Proses muncul dan berkembangnya pendidikan di Pakualaman sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik yang berlaku pada masa kolonial, hal inilah yang telah melahirkan golongan-golongan terpelajar yang kelak berperan penting dalam proses awal muncul dan kemudian berkembangnya pendidikan untuk masyarakat bumi putra.²²

Setelah adanya politik etis, pemerintah Hindia Belanda mulai menaruh perhatiannya untuk masyarakat pribumi terutama di bidang pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya beberapa macam sekolah dengan menggunakan sistem Barat. Dalam perkembangannya ternyata sekolah-sekolah tersebut tidak dapat menampung jumlah anak-anak pribumi yang ingin bersekolah. Selain kurangnya sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai, biaya sekolah yang cukup tinggi sehingga tidak dapat dijangkau oleh anak-anak dari keluarga dengan keadaan ekonomi menengah kebawah. Selain itu juga banyak terdapat diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah pada anak-anak. Diskriminasi tersebut ditunjukkan dengan mencoloknya perbedaan sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah untuk anak-anak Eropa dan bangsawan dengan anak-

²²Sri Sutjainingsih, *Sejarah Pendidikan DIY*, (Yogya:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981).

anak pribumi. Faktor-faktor tersebutlah yang pada akhirnya memunculkan perguruan partikelir yang 2 di antaranya ada dalam naungan Pakualaman.²³

Beberapa aspek kehidupan yang ada di masyarakat Yogyakarta. Pendidikan di Yogyakarta lah yang menjadi fokus dari perhatian penulis untuk menulis skripsi ini. Di Yogyakarta ternyata banyak sekali terdapat sekolah partikelir, dan terdapat sekolah partikelir yang ada di Pakualaman yang bernama Suryengdurijan Lor dan sekolah Padmosekarman. Sekolah partikelir menurut buku ini adalah sekolah rendahan kelas II yang didirikan oleh masyarakat pribumi dan ditujukan untuk pendidikan masyarakat pribumi sendiri. Selain menyebutkan adanya sekolah partikelir, buku ini juga menyebutkan tentang beberapa hal yang menyangkut sekolah partikelir tersebut, seperti gedung sekolahan, murid dan gurunya, dan lain sebagainya.²⁴

F. Historiografi yang Relevan

Sumber merupakan modal pokok dalam merekonstruksi peristiwa sejarah karena dapat ditarik fakta sejarah yang kemudian menjadi dasar yang dapat menghidupkan masa lampau. Selain adanya sumber yang dibutuhkan, untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga harus ada suatu historiografi yang relevan. Historiografi relevan dari sumber yang tercetak menggunakan karya ilmiah

²³Mochammad Tauchid, *Perguruan Partikelir*, (Yogya : Majelis Luhur Persatuan Tamsis, 1955).

²⁴PEMDA DIY, *Kota Jogjakarta 200 tahun (7 Oktober 1956-7 Oktober 1956)*, Kota Praja Jogjakarta, 1956.

berbentuk skripsi dari Parinem, mahasiswa UNY jurusan Ilmu Sejarah angkatan 2003 yang berjudul “Perkembangan Pendidikan di Adikarto Tahun 1900-1942”. Dalam skripsi ini dijelaskan pada tahun 1900-an telah banyak bermunculan berbagai sekolah di daerah Adikarto. Sekolah yang ada di daerah Adikarto yang dimaksud adalah sekolah yang banyak didirikan oleh Pemerintah Belanda. Dengan banyaknya bermunculan sekolah-sekolah di daerah Adikarto, maka kemudian timbul dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Perbedaannya dengan penulisan skripsi ini adalah bahwa penulis hendak membahas tentang sekolah partikelir yang ada di dalam lingkungan Pakualaman baik yang ada di luar maupun dalam kota, mulai dari awal sekolah ini ada, perkembangannya, hingga pengaruh yang ditimbulkan dari adanya sekolah partikelir yang ada di Pakualaman tersebut. Sekolah yang dimaksud adalah sekolah partikelir yang didirikan oleh Pakualaman di lingkungan Pakualaman yang pada awalnya tanpa ada campur tangan dari Pemerintah Belanda.

Selain itu, penulis juga menggunakan sebuah skripsi dari Sedianto Setio,, mahasiswa UGM prodi Sastra angkatan 1983 yang berjudul “Kerabat Pakualaman Dalam Pendidikan 1864-1930” Didalamnya banyak dijelaskan mengenai bagaimana sikap dari para kerabat Pakualaman dengan adanya pendidikan Barat yang mulai masuk dalam lingkungan keluarga Pakualaman. Satu per satu anggota keluarga dari Pakualaman mulai masuk ke sekolah dengan sistem Barat, hingga setelah mereka lulus mereka kemudian mengenalkan pendidikan partikelir tersebut di masyarakat sekitar Pakualaman. Mereka mendirikan sekolah partikelir yang di tujuhan untuk masyarakat Pakualaman yang sekolahnya masih dalam

lingkungan atau daerah kekuasaan Pakualaman. Dalam perkembangannya tentu saja hal tersebut membawa dampak bagi keluarga Pakualaman dan masyarakat sekitar Pakualaman, dampak tersebut tentu saja terdiri dari dampak negatif maupun dampak positif bagi kelangsungan praja dan kebudayaan Pakualaman.

Perbedaan dengan penulisan skripsi ini adalah “Perkembangan Sekolah Partikelir Pakualaman 1892-1942” adalah meskipun ruang lingkupnya sama-sama mengambil latar pendidikan di Pakualaman, namun pembahasan dalam skripsi ini tidak hanya membahas tentang bagaimana keadaan pendidikan di dalam kerabat (keluarga) Pakualaman saja, namun juga banyak membahas pendidikan masyarakat Pakualaman. Sekolah partikelir yang di dirikan di Pakualaman lebih disoroti dalam penulisan skripsi ini.

G. Metode Penelitian

Dalam rangka menguji dan mengkaji kebenaran rekonstruksi sejarah yang sudah ada dan peninggalannya, maka sebuah penelitian harus dilakukan dengan analisa kritis. Analisa itu sendiri terdiri dari:

1. Heuristik

Heuristik merupakan suatu langkah dalam penelitian sejarah, seorang peneliti sejarah harus mengumpulkan sumber-sumber, bahan-bahan, dan arsip-arsip sejarah yang berhubungan dengan peristiwa sejarah yang akan diteliti. Penulis berusaha mencari sumber-sumber arsip yang berupa dokumen dan data-data yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini. Pencarian tersebut dilakukan di ruang arsip milik

Pakualaman dan ruang arsip yang terdapat di dalam perpustakaan museum Sonobudoyo. Sumber dalam heuristik itu sendiri terdiri dari;

- a. Sumber Primer, merupakan suatu dokumen atau sumber informasi lain yang diciptakan pada waktu atau di sekitar waktu peristiwa sejarah yang akan di teliti tersebut terjadi.

Arsip Puro Paku-Alaman No. 2130. Berisi peraturan pengawasan sekolah partikelir tahun 1934

Arsip Puro Paku-Alaman No 2140. Berisi tentang pendirian sekolah tahun 1928

Arsip Puro Paku-Alaman No. 2153. Berisi tentang penyediaan alat-alat yang digunakan di sekolah untuk proses belajar mengajar.

Arsip Puro Paku-Alaman No. 2304. Berisi tentang keadaan pendidikan di Paku-Alaman dan kawontenan abdi dalem

Arsip Puro Paku-Alaman No. 2323. Berisi tentang pengawasan sekolah, subsidi, pendirian, penyediaan buku, dan perbatasan jumlah buku

- b. Sumber Sekunder, merupakan suatu bentuk informasi yang berbentuk karya sejarah yang ditulis berdasarkan pada sumber-sumber primer dan biasanya merujuk ke sumber lainnya. Sumber sekunder ideal biasanya mengandung laporan peristiwa di masa lampau berikut generalisasi, analisis, sintetis, interpretasi, dan atau evaluasi terhadap peristiwa itu sendiri. Sumber sekunder terdiri dari :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Balai pustaka. 1986.

Mochammad Tauchid. *Perguruan Partikelir*. Yogya: Majelis Luhur Persatuan Tamsis. 1955.

Sri Sutjjaningsih. *Sejarah Pendidikan DIY*. Yogya: Departemen Pendidikan dan kebudayaan. 1981.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber merupakan suatu kegiatan analisis terhadap sumber sejarah setelah peneliti melakukan kegiatan heuristik. Langkah ini dinilai sangat penting dan harus dilakukan oleh para sejarawan terhadap dokumen-dokumen setelah mengumpulkan informasi-informasi dari arsip-arsip yang di dapat.

a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern dilakukan pada keadaan luar yang tampak pada arsip yang telah ditemukan. Apakah arsip tersebut sesuai dengan waktu peristiwa terjadi bisa dikaji ulang. Dari arsip yang ditemui, kertas dari arsip tersebut sudah usang dimakan waktu dan berbahasa Belanda. Melihat dari kondisi fisik arsip seperti dari keadaan kertas, bahasa dan penulisannya, penulis mencoba mencocokkan dengan tahun atau masa arsip tersebut diterbitkan sudah relevan atau belum.

b. Kritik Intern

Kritik intern adalah suatu cara untuk menilai bagaimana isi dari sebuah arsip yang ditemukan. Apakah isi dari arsip tersebut layak untuk dipakai sebagai sumber dalam penulisan ini. Penulis berusaha untuk

mencocokkan isi dari arsip-arsip yang ditemukan dengan sumber arsip lainnya ataupun dengan sumber terbitan (buku).

3. Interpretasi

Interpretasi dapat diartikan sebagai penafsiran. Penafsiran ini sendiri dilakukan terhadap sumber-sumber yang ditemukan. Dalam melakukan penafsiran, seorang peneliti sejarah harus melakukan analisis sesuai dengan fokus penelitiannya. Dengan adanya penafsiran ini, diharapkan penulisan sejarah akan lebih bersifat objektif dalam batas keilmiahannya.

4. Historiografi

Historiografi merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh dalam suatu penelitian sejarah. Historiografi itu sendiri dimaksudkan sebagai langkah penulisan hasil yang didapat seorang peneliti sejarah dalam atau selama melakukan penelitian sejarah. Setelah mengumpulkan sumber-sumber yang memadai yang terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder, dilakukan kritik sumber terhadap sumber-sumber yang diperoleh yang bertujuan sebagai tes uji kebenaran terhadap sumber-sumber itu sendiri. Setelah melakukan kritik sumber, selanjutnya dilakukan interpretasi sejarah. Hal ini bertujuan agar penulis lebih objektif dalam menuliskan karya-karyanya. Setelah semuanya dilakukan, satu hal vital yang harus dilakukan seorang sejarawan adalah menulis hasil penelitiannya dalam bentuk karya sejarah dengan menerapkan metodologi yang ada.

H. Pendekatan Penelitian

Adanya perkembangan dan kemajuan yang pesat bidang ilmu pengetahuan, sejarah sebagai ilmu dalam perjalanannya sudah tidak mampu lagi menjelaskan berbagai masalah yang kompleks. Dalam hal ini, sejarah tentu saja memerlukan bantuan dari ilmu pengetahuan-ilmu pengetahuan yang lain, sehingga perlu sekali diadakan pendekatan-pendekatan secara multidimensional yang mampu mengungkap unsur-unsur seperti unsur ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya.

Pendekatan dalam sejarah dimaksudkan untuk menjelaskan dari segi mana kajian sejarah itu akan dilakukan, dimensi mana yang akan diperhatikan, unsur-unsur mana yang akan diungkapkan, dan lain-lain. Dengan demikian, deskripsi dan rekonstruksi yang diperoleh akan banyak ditentukan oleh jenis pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini, pendekatan historis akan meneliti dan menyelidiki tentang sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau beserta kejadian-kejadiannya dengan maksud untuk menilai secara kritis seluruh hasil penelitian dan penyelidikan yang dijadikan pedoman bagi penilaian dan penentuan serta kemajuan di masa depan.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan ilmu sosial, seperti:

1. Pendekatan Antropologi, di mana dalam pendekatan ini digunakan nilai-nilai, status, gaya hidup, sistem kepercayaan dan pola hidup yang mendasari perilaku tokoh sejarah. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui proses perubahan manusia, masyarakat, dan persebaran

kebudayaan. Bila digunakan dalam skripsi ini, pendekatan antropologi bertujuan untuk mengetahui proses perubahan masyarakat dan kebudayaan di daerah Pakualaman sebelum dan sesudah mengenal pendidikan, terutama setelah berdirinya sekolah partikelir Suryengdurijan Lor, Padmosekarnan dan sekolah Ongko Loro yang berdiri di Pakualaman.

2. Pendekatan Politis; dalam pendekatan ini terkandung kekuasaan yang sedang berjalan, bermaksud untuk mengubah dan mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat kenegaraan. Dalam skripsi ini, penulis hendak menguraikan kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda dalam menghadapi kemunculan dan perkembangan pendidikan di Pakualaman terutama setelah berdirinya sekolah partikelir Suryengdurijan Lor, Padmosekarnan dan sekolah Ongko Loro yang berdiri di Pakualaman.
3. Pendekatan Sosiologis; menurut Max Weber, pendekatan sosiologis ini dimaksudkan sebagai upaya pemahaman interpretatif dalam kerangka yang dapat memberikan penjelasan secara klausal terhadap perilaku-perilaku sosial dalam sejarah.²⁵ Dalam pendekatan ini, akan dibahas segi-segi sosial dari peristiwa yang dikaji. Melihat gejala dari aspek sosial mencakup hubungan sosial dalam suatu dimensi sosial tingkah laku masyarakat Pakualaman sebagai akibat dampak sosial masyarakat dari adanya sekolah partikelir Surjengdjuritan Lor, Padmosekarnan dan sekolah Ongko Loro yang berdiri di Pakualaman.

²⁵Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1993), hlm. 18.

4. Pendekatan Ekonomi; pendekatan ekonomi dalam peristiwa sejarah sangat berhubungan erat. Karena dengan pendekatan ekonomi tersebut dapat diketahui perkembangan peristiwa sejarah karena menyangkut tindakan sosial yang menjadi pilihan hidup seseorang. Dalam pendekatan membahas keadaan ekonomi masyarakat Pakualaman pada masa itu, yang mau tidak mau tetap akan memunculkan kelas sosial dalam masyarakat yang hal ini tentu akan sangat berpengaruh dalam pendidikan masyarakat Pakualaman terutama dengan berdirinya sekolah partikelir di lingkungan Pakualaman.²⁶

H. Sistematika Pembahasan

Bab. I Pendahuluan

Pendahuluan berisi beberapa ulasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, kajian pustaka, historigrafi yang relevan, metode dan pendekatan penelitian, beserta sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Perkembangan Sekolah Partikelir Pakualaman 1892-1942”.

Bab. II Pakualaman Tahun 1892-1942

Bab II diuraikan letak geografis Pakualaman serta keadaan sosial-politik Pakualaman. Termasuk juga di dalamnya situasi dan kondisi di wilayah

²⁶Djoko Suryo, “Sekitar Masalah Sejarah dengan Ilmu-Ilmu Sosial: Sebuah Catatan”, dalam *Jurnal Sejarah*, (Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada, No. 4 Tahun 1980). hlm. 10.

Pakualaman itu sendiri, keadaan orang-orang yang tinggal di Pakualaman, serta masyarakat yang tinggal di sekitarnya yang tentu saja pernah mengenyam pendidikan di sekolah partikelir di Pakualaman. Gambaran tersebut meliputi kehidupan sehari-hari mereka, yang di dalamnya tercakup juga adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan, dan lain-lain.

Bab. III Sekolah Partikelir di Pakualaman

Dalam Bab III ini dibahas mengenai awal berdirinya sekolah partikelir yang ada di dalam wilayah Pakualaman, dalam penulisan skripsi ini penulis akan fokus pada pembahasan tentang sekolah partikelir yang berdiri di wilayah Pakualaman baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar kota wilayah Pakualaman. Selain awal mula berdirinya, juga dijelaskan perkembangan hingga dampak yang dibawa dari adanya sekolah tersebut pada masyarakat di dalam atau di sekitar Pakualaman.

Bab. IV Pengaruh Sekolah Partikelir Pakualaman tahun 1892-1942

Dalam Bab IV dijelaskan mengenai apa peran sekolah partikelir yang ada di dalam wilayah Pakualaman. Dengan berdirinya sekolah partikelir tersebut, terjadi perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat sekitar Pakualaman, terutama perubahan dalam di bidang pendidikan.

Bab. V Kesimpulan

Pada bab kesimpulan, diuraikan mengenai jawaban dari rumusan masalah, yaitu keadaan geografis, demografis dan pendidikan Pakualaman. Sejarah Awal berdirinya hingga berkembangnya sekolah Partikelir di Pakualaman.

BAB II **PAKUALAMAN TAHUN 1892-1942**

A. Keadaan Geografis Pakualaman

Kadipaten Pakualaman adalah salah satu dari empat Kerajaan Jawa (*Praja Kejawen*), yang keempat kerajaan itu sama-sama berasal dari sebuah kerajaan yang pernah berjaya di hampir seluruh pulau Jawa dan sebagian di pulau Kalimantan, yaitu Mataram Islam.¹ Mataram yang didirikan oleh Panembahan Senopati (1575-1601) mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613-1645). Pada masa pemerintahan Paku Buwono II (1727-1749), Mataram berhasil dikuasai VOC² (Belanda). Tahun 1743, Belanda telah menguasai daerah-daerah pelayaran dan perdagangan yang semula dikuasai Mataram, selain itu sistem pemerintahan Mataram seperti pengangkatan dan pemberhentian *pepatih dalem* dan para bupati dikendalikan oleh Belanda. Sejak 11 Desember 1749, Mataram tidak lagi berdaulat secara *de jure* dan *de facto* karena Pakubuwono II menyerahkan kedaulatannya kepada Belanda.³

Meruntuhkan kerajaan Mataram ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Seorang pangeran bernama Mangkubumi tidak terima dengan penyerahan

¹ Ilmi Albilahdiyah, *Puro Pakualaman Selayang Pandang*, (Yogyakarta : DEPDIBUD, 1984), hlm. 22

²VOC merupakan kepanjangan dari *Vereenigde Oost-Indische Compagnie*, yang merupakan suatu kongsi dagang yang keberadaannya sangat berpengaruh dalam perekonomian masyarakat Indonesia.

³ Ilmi Albilahdiyah, *op, cit.* hlm. 25

kedaulatan dan sikap lemah Paku Buwono II itu. Tanggal 19 Mei 1746, Pangeran Mangkubumi meninggalkan istana bersama 3 pangeran lainnya yaitu Pangeran Wijil, Pangeran Krapyak, dan Pangeran Hadiwijoyo. Mereka bergabung dengan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa, untuk berperang melawan Belanda. Tahun 1750, mereka mengepung ibukota Mataram. Sampai pada tahun 1752, sebagian besar wilayah Mataram berhasil mereka kuasai. Keberhasilan perjuangan Pangeran Mangkubumi itu menghasilkan sebuah perjanjian politik yang membuka lembaran baru dalam sejarah Mataram.⁴ Tanggal 23 September 1754, Belanda bernegosiasi dengan Pangeran Mangkubumi dan berjanji untuk memberi setengah dari kerajaan Mataram. Akhirnya, dibuatlah Perjanjian Giyanti⁵ yang merupakan kesepakatan bersama antara Pangeran Magkubumi, Paku Buwono III dan Pemerintah Belanda.⁶

Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 menjadikan wilayah Mataram terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Pada tahun 1757 wilayah kekuasaan Susuhunan Surakarta dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Surakarta (Solo) dan Mangkunegaran. Sementara itu, Yogyakarta juga telah terbagi

⁴Haryadi Baskoro, *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogyakarta*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 10.

⁵Isi perjanjian Giyanti yang membagi wilayah Mataram menjadi dua wilayah (Surakarta dan Yogyakarta) dapat dilihat di lampiran nomer 03, hlm. 100.

⁶Perjanjian Giyanti adalah kesepakatan antara VOC, pihak Mataram (diwakili oleh Sunan Pakubuwana III), dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Kelompok Pangeran Sambernyawa tidak ikut dalam perjanjian ini. Pangeran Mangkubumi demi keuntungan pribadi memutar haluan menyeberang dari kelompok pemberontak bergabung dengan kelompok pemegang legitimasi kekuasaan memerangi pemberontak yaitu Pangeran Sambernyawa.

menjadi dua wilayah, yaitu Kasultanan⁷ Yogyakarta dan Pakualaman.⁸ Keempat *Vorstenlanden*⁹ itu masing-masing dipimpin oleh penguasa *vorstenlanden* itu sendiri, yaitu Sultan, Sunan dan Adipati.¹⁰ Pakualaman merupakan yang termuda dari keempat keraton yang berada di Jawa Tengah. Seperti halnya dengan wilayah Mangkunegaran di Solo, yang didirikan oleh dinasti Paku Buwono yang lebih muda, Pakualaman adalah kerajaan terpisah dari kerajaan Yogyakarta. Walaupun terpisah dan merdeka mereka tetap mengakui kesenioran kraton Yogyakarta Hadiningrat. Sistem pemerintahan dalam Pakualaman mirip sekali dengan sistem pemerintahan di keraton, hal ini dikarenakan Pakualaman muncul dari sebagian wilayah Kasultanan dan para penguasanya masih sedarah dengan para kerabat keraton.¹¹ Pemerintah kolonial Inggris banyak berperan dalam membangun Pakualaman ini. Abad ke-19

⁷Kasultanan merupakan suatu daerah yang diperintah oleh seorang raja yang sering disebut dengan “Sultan”, (Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2005), hlm. 502).

⁸Abdurrachman Surjomiharjo, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe (Sejarah Sosial 1880-1930)*, (Jakarta : Komunitas Bambu, 2008), hlm. 19.

⁹ Vorstenlanden merupakan suatu istilah atau sebutan dalam bahasa Belanda untuk suatu daerah yang dikuasai oleh raja, (Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: PT Lestari Perkasa, 2006), hlm. 772

¹⁰Adipati adalah suatu gelar untuk raja muda atau wakil raja yang biasanya digunakan di lingkungan kerajaan Pakualaman dan mangkunegaraan, (Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2005), hlm. 16.

¹¹ Sisilah Kerabat Pakualaman dapat dilihat di lampiran nomer 04, hlm. 103.

Pakualaman dan Keraton Yogyakarta berada dalam pengawasan kekuasaan kolonial Perancis (Deandels).¹²

Masa pemerintahan Inggris di Hindia Belanda pada tahun 1811-1815 bisa dibilang cukup singkat. Hal ini dikarenakan pada saat kedatangan mereka di wilayah kerajaan Yogyakarta dan Surakarta sedang berkembang paham anti penjajah. Melihat hal tersebut, Gubernur Inggris tentu tidak menyerah begitu saja, ia menempuh berbagai cara untuk untuk menguasai Keraton Yogyakarta. Salah satu caranya adalah dengan ikut campur dalam pertikaian yang berkepanjangan antara Hamengkubuwono II yang bersikap anti terhadap penjajah dengan anaknya sendiri Hamengkubuwono III yang justru bersikap sebaliknya, yaitu menyambut baik kedatangan penjajah. Raffles kemudian menyerang kraton Yogyakarta, dan atas bantuan paman Sultan Pangeran Nata Kusuma, dan akhirnya dapat menyingkirkan Hamengkubuwono II dan mengangkat Hamengkubuwono III.

Atas bantuan Pangeran Nata Kusuma pada tahun 1813, Raffles membuat pemerintahan kedua di Yogyakarta dengan mengangkat Pangeran Nata Kusuma sebagai kepala pemerintahan dengan nama Sri Paduka Paku Alam I pada 17 Maret 1813.¹³ Hal ini dilakukan Raffles untuk mengurangi kekuatan dan kekuasaan Hamengkubuwono II di wilayah Yogyakarta. Gubernur Inggris berjanji, selama Pangeran Paku Alam bersikap seperti kehendak Inggris, maka akan memberikan

¹² Haryadi Baskoro, *op,cit*, hlm 11.

¹³ Tercantum dalam “*Gedenkschrift 25 Jarig Bertuurs-Lubileum van ZH Paku Alam VII*” yang di terbitkan oleh Batavia, hlm. 14.

tunjangan bulanan kepada Sri Paku Alam sebesar 750 real seumur hidup.¹⁴ Gubernemen Inggris juga akan mengusahakan agar Sri Sultan Hamengku Buwono III memberi tanah kepada Sri Paku Alam sebesar 4.000 cacah, dan tunjangan bulanan beserta tanah tersebut akan beralih kepada puteranya yang tertua yaitu Pangeran Suryaningrat setelah Sri Paku Alam meninggal.¹⁵

Kadipaten Pakualaman adalah negara dependen yang berbentuk kerajaan. kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan sesuai dengan penjanjian atau kontrak politik yang dibuat oleh negara induk bersama-sama dengan negara dependen. Status kerajaan ini mirip dengan status Praja Mangkunagaraan di Surakarta, pemerintahan dijalankan oleh Papatih Pakualaman bersama-sama dengan Gubernur Hindia Belanda untuk Yogyakarta. Paku Alam I membangun pusat pemerintahan tidak jauh di sebelah timur kraton Yogyakarta. Daerah-daerah turun temurun yang sesuai dengan kehendak Letnan Gubernur Raffles diperintah oleh Sri Paku Alam I di bawah perlindungan langsung dari Gubernur Inggris.

Wilayah Pakualaman¹⁶ sendiri terdiri dari Kabupaten Brosot ditambah sebagian kecil wilayah Ibukota Yogyakarta, yaitu di daerah yang terletak di timur sungai Code yang menjadi tempat kediaman Sri Paku Alam I yang dijadikan pusat

¹⁴ Abdurachman, *op.cit*, hlm 27

¹⁵ Isi kontrak politik antara Sri Paku Alam I dengan Gubernur Inggris pada tanggal 17 Maret 1813 dapat dilihat di lampiran nomer 05, hlm. 104.

¹⁶ Peta daerah-daerah yang termasuk wilayah Pakualaman dapat dilihat di lampiran nomer 06, hlm. 107.

pemerintahan bagi daerah Pakualaman atau sering disebut dengan Puro Pakualaman. Sedangkan kabupaten Brosot sendiri terdiri dari empat distrik yaitu Galur, Tawangrejo, Tawangsoaka, dan Tawangkarto.¹⁷ Wilayah Kadipaten Pakualaman yang berada di daerah kota atau sekitar Pakualaman merupakan daerah dataran rendah. Daerah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah kasultanan Yogyakarta dari berbagai arah. Wilayah Pakualaman yang lainnya berada jauh dari wilayah Yogyakarta, yaitu ada di sebagian wilayah di Kulon Progo, yang tentu saja berbatasan dengan wilayah-wilayah yang masuk dalam kekuasaan Yogyakarta namun letaknya ada di Kulon Progo.¹⁸ Kondisi alamnya sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu;

1. Daerah perbukitan yang berupa batu kapur atau gamping Nepal, yang terdapat di wilayah Giripeni, Kedung Sari, Krembangan dan Cerme
2. Daerah dataran rendah yang berupa persawahan dan ladang yang tanahnya cukup subur yang ada di daerah galur, Brosot, Panjatan, Bendungan, Wates dan Temon.
3. Daerah pantai dan rawa, yang terletak di daerah Trisik, Banaran, Bugel dan Karang Wuni

Selain itu juga Bangunan Pakualaman yang menghadap ke arah selatan ini melambangkan penghormatannya terhadap Keraton Yogyakarta. Seperti keraton lainnya Pakualaman memiliki kompleks yang dikelilingi oleh tembok yang tinggi dan

¹⁷Abdurrachman Surjomiharjo, *op.cit*, hlm. 20.

¹⁸Soedarisman. Poerwokoesoemo, *Kadipaten Pakualaman*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 151.

kokoh. Hal ini tentu bertujuan untuk melindungi daerah kekuasaan Pakualaman dari serangan musuh yang ada di luar beteng.¹⁹

Pemerintah Inggris membebaskan daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Sri Paku Alam, tidak akan dipungut pajak-pajak baru, dan penghasilan tanahnya tidak boleh ditambah atau diubah, kecuali jika sudah mendapatkan ijin lebih dahulu dari *Gubernemen*²⁰ Inggris. Wilayah Pakualaman yang akan di jelaskan dalam penulisan ini adalah wilayah Pakualaman baik daerah yang masih di dalam kota Yogyakarta maupun yang ada di luar kota Yogyakarta (Kulon Progo).

B. Keadaan Demografi Pakualaman

Kepadatan penduduk di suatu daerah mempunyai pengaruh terhadap bidang pendidikan. Kepadatan penduduk tentu sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat yang sejahtera tentu saja akan meningkatkan perkembangan pendidikan di masyarakat. Zaman kekuasaan pemerintah kolonial mulai melakukan perhitungan penduduk di wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang ada di Jawa.²¹ Abad ke-18, jumlah penduduk Pulau

¹⁹ Soeraji, *Kadipaten Pakualaman*, pada [http : // www.google.com/Kadipaten Pakualaman](http://www.google.com/KadipatenPakualaman). Diakses pada tanggal 19 Februari 2012.

²⁰ Gubernemen merupakan suatu pemerintahan yang kekuasaannya ada di tangan pemerintah Belanda, (Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2005), hlm.157).

²¹ J. C. Breman. *Djawa : Pertumbuhan Penduduk dan Struktur Demografis*, (Jakarta : Bhratara, 1971), hlm.17.

Jawa tidak mengalami pertumbuhan yang mencolok, karena pada saat itu telah terjadi perang dalam rangka perebutan kekuasaan di kerajaan Mataram. Perhitungan jiwa selalu dianggap sebagai suatu cara untuk memperbaiki dan menguatkan pencatatan penduduk. Akibatnya perhitungan penduduk dianggap sebagai hal yang sekunder.²² Perhitungan penduduk dianggap hanya manipulasi data yang bertujuan untuk kepentingan kolonial saja, sehingga tidak dapat dijadikan patokan untuk mengetahui jumlah penduduk sebenarnya. Hal ini dikarenakan cara perhitungan yang kurang teliti dan kurang mendetail. Saat Raffles berkuasa di Jawa, yaitu pada tahun 1814 ditemukan adanya gejala kelebihan penduduk di Pulau Jawa. Ia memperkirakan suatu saat bila seluruh tanah dibuka, maka tanah-tanah tersebut akan dipenuhi dan dipadati oleh manusia.

Kenaikan jumlah penduduk pada awal abad ke-19 umumnya merupakan hasil dari tindakan pemerintah Hindia-Belanda untuk mengurangi tingkat kematian..²³ Jumlah penduduk pribumi dan penduduk asing di Karesidenan Yogyakarta tahun 1920 terdiri dari golongan pribumi, Eropa, Cina dan Arab yang jumlahnya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut;

²²Sugarda Purbakawanca, *Djawa: Pertumbuhan Penduduk dan Struktur Demografis*, (Jakarta : Bhratara. 1971), hlm. 24.

²³ Abdurrachman Surjomiharjo, *op.cit.*, hlm 24.

Tabel 01
Jumlah Penduduk Asing yang Menempati Wilayah Karesidenan Yogyakarta
(jiwa)

Daerah Administrasi	Erupa	Pribumi	Cina	Arab
Pakualaman	354	8.247	172	-
Tugu	955	19.923	2.479	25
Kauman	896	18.306	2.822	35
Gading	16	17.930	44	-
Lempuyangan	1.438	15.296	126	4
Kraton	71	14.552	-	-

Sumber : *Uitkomsten van den Nov 1920 Gehouden Volkstelling in het Gewest Djogjakarta*

Tabel di atas sudah menunjukkan bahwa di Yogyakarta sendiri telah ditempati oleh para bangsa asing yang jumlahnya tentu tidak sedikit. Bangsa asing yang mendiami kota Yogyakarta jumlahnya yang paling banyak adalah dari bangsa Cina. Mereka banyak menempati daerah-daerah di Yogyakarta karena kepentingan ekonomi, mereka melihat cukup banyak peluang usaha yang menghasilkan banyak keuntungan terutama di bidang perindustrian. Akibatnya di wilayah Yogyakarta banyak bermunculan pendirian pabrik-pabrik industri seperti industri tekstil yang banyak didirikan oleh para bangsa Cina yang banyak tinggal di Yogyakarta. Untuk daerah Pakualaman sendiri juga cukup banyak penduduknya yang bisa di lihat dari tabel sebagai berikut;

Tabel 02
Jumlah Penduduk Pakualaman Tahun 1922 (jiwa)

No.	Daerah Administrasi	Jumlah Penduduk
1	Jagalan Kidul	1.100
2	Jagalan Lor	1.279
3	Margoyasan	214
4	Kauman	364
5	Ledokan	500
6	Kepatihan	512
7	Gunung Ketur Kulon	710
8	Gunung Ketur Wetan	1.093
9	Gendeng	117
	Jumlah	5.889

Sumber: Arsip Pakualaman No. 3939 Berkas Mengenai Macam-macam Cacah Jiwa
07 September 1922

Wilayah Pakualaman terdiri dari wilayah yang berdekatan dengan Ibukota Yogyakarta dan sebagian wilayah kecil yang ada di Kabupaten Kulon Progo, data jumlah penduduknya sebagai berikut;

Tabel 03
Jumlah Kepadatan Penduduk Adikarto Tahun 1920 (jiwa)

Onderdistrik	Eropa			Pribumi			Cina		
	P	W	T	P	W	T	P	W	T
Galur	25	21	46	9.740	10.054	19.794	54	36	90
Panjatan	5	1	6	12.540	13.144	25.684	-	-	-
Wates	9	8	17	11.977	12.560	24.537	90	76	160
Temon	10	5	15	8.170	8.064	16.834	-	1	1
Jumlah	49	35	84	42.427	44.422	86.849	144	77	251

Sumber : *Uitkomsten Der in de Maad November 1920, Ghouken Volkstelling*

Perekonomian masyarakat sendiri cukup beragam. Pada awal abad ke-19 konsekuensi tertentu dari pengaruh Barat mulai tampak jelas.²⁴ Dalam bidang ekonomi akibat yang paling menonjol adalah meningkatnya jumlah penduduk dan diperkenalkannya ekonomi uang.²⁵ Hal ini dikarenakan banyaknya pabrik gula yang didirikan oleh pihak asing yang menggunakan tenaga kerja dari orang pribumi.

Dengan demikian, membuat uang berputar di lingkungan penduduk dalam bentuk upah yang diberikan untuk para tenaga kerja pribumi yang bekerja di pabrik milik orang asing.²⁶ Perkembangan ini semakin cepat selama fase kebijakan ekonomi yang sering disebut dengan periode Liberal dari tahun 1870-1900. Periode inilah tanaman tebu, kopi, teh dan kina mulai dikembangkan diperkebunan wilayah Kulon Progo, perusahaan-perusahaan swasta dapat menyewa sawah-sawah yang beririgasi dari pemilik bangsa Indonesia untuk penanaman tebu secara bergantian dengan penanaman padi oleh penduduk pribumi.²⁷ Proses ini membuat semakin melemahnya kepemilikan tanah penduduk pribumi, karena lahan ini menjadi penting bagi penanam tebu yang memandang desa sebagai perusahaan umum yang memiliki lahan atas

²⁴W. J. Wertheim, *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi*, (Yogyakarta : Tiara wacana, 1990), hlm.65.

²⁵Ekonomi uang merupakan suatu sistem perekonomian yang mulai memberlakukan dan menggunakan uang sebagai alat untuk proses jual beli yang menggantikan pertukaran barang pada sistem perekonomian sebelumnya (Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perkebunan di Nusantara : Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1991), hlm. 03.

²⁶W. F. Wertheim, *loc.cit.*

²⁷ Abdurachman, *op,cit.*, hlm 69.

dasar komunal sehingga mereka merasa diwajibkan berbicara hanya dengan pemimpin desa, bukan dengan para pemilik secara individual. Para petani memperoleh pendapatan dalam bentuk sewa yang dibayar oleh pemilik perkebunan dan mereka dapat pula memperoleh hasil lebih di perkebunan sebagai kerja harian atau musiman.

Sistem Tanam Paksa telah menjadikan masyarakat pribumi terbiasa menjadi tenaga kuli di bawah pengawasan orang Barat. Ekonomi subsistensi²⁸ untuk memenuhi kebutuhannya sendiri di hapuskan secara *progresif*²⁹, meskipun demikian masyarakat Pakualaman tetap ingin mempertahankan ikatan dengan tanahnya tersebut. Hasilnya para petani mempertahankan sikap pasif terhadap serbuan ekonomi uang. Mereka bertahan sebagai petani yang memenuhi kebutuhannya sendiri, mencari pendapatan lain jika dibutuhkan, dan mencoba mencari sedikit tambahan jika kondisi sama sekali tidak bekerja namun tetap dipekerjakan oleh suatu usaha milik Barat. Mereka lebih senang memberikan keuntungan kepada Cina atau orang Arab, karena

²⁸Ekonomi Subsistensi merupakan suatu perekonomian yang didalamnya merupakan suatu usaha yang menghasilkan barang-barang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari mereka sendiri, (Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perkebunan di Nusantara : Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1991), hlm. 04.

²⁹Progresif merupakan istilah untuk menggambarkan suatu perubahan yang dapat mengarah ke suatu kemajuan, yang digambarkan pada kemajuan masyarakat setelah di kenalkan dengan pendidikan Barat, (Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2005), hlm 374).

mereka dianggap sudah sejak lama telah menguasai lingkungan tradisional pedesaan.³⁰

Kontak pertama dengan dunia Barat dilakukan, daerah-daerah di Pakualaman merupakan area pertanian, yang kebanyakan mereka menanam padi di persawahan mereka.³¹ Ada pula penduduk yang mempraktikkan sistem “ladang berpindah”³² di area hutan yang mereka bersihkan dengan cara membakarnya kemudian mereka menjadikan area tersebut sebagai lahan tanam mereka. Bentuk ekonomi yang dianut masyarakat bisa dikatakan tertutup,³³ para petani biasanya menggunakan hasil-hasil tanaman di ladang mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Selain itu, ada sejumlah pertukaran produk dan tenaga kerja tertentu yang banyak di jumpai di desa-desa, yang pada umumnya berdasarkan prinsip komunal, tradisional dan non-komersional. Perdagangan eksternal tidak begitu diminati oleh pemerintah, pada

³⁰ Bangsa Arab dan Cina lebih dulu masuk ke Indonesia bila dibandingkan dengan bangsa Belanda. Bangsa Arab dan Cina telah berhasil mendekatkan diri mereka pada masyarakat terutama masyarakat tradisional pedesaan.

³¹W. F. Wertheim, *op,cit.* hlm.65

³² Ladang berpindah adalah penggunaan ladang yang ada di hutan dengan membersihkan ladang tersebut terlebih dahulu setelah itu baru bisa ditanami, setelah ladang tersebut dianggap sudah tidak produktif lagi, mereka akan berpindah mencari tempat (lahan) untuk dijadikan ladang baru yang lebih produktif, (Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perkebunan di Nusantara : Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1991), hlm. 03

³³Ekonomi tertutup adalah perekonomian yang menggunakan hasil dari lahan mereka (petani) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terpengaruh dengan kebudayaan perekonomian lainnya seperti ekonomi uang, mereka juga masih menggunakan sistem tukar menukar barang, menggunakan suatu barang sebagai alat pengganti uang, (Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perkebunan di Nusantara : Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1991), hlm. 03.

umumnya pemerintah lebih senang menarik pajak dari masyarakat yang dilakukan secara paksa yang kemudian dalam perkembangannya telah berhasil dihapuskan oleh Raffles. Dampak pemerintah pada kehidupan desa, telah melebihi pengaruh yang diberikan oleh penguasa pribumi, yang dalam wilayah luas membiarkan ekonomi desa dalam keadaan utuh. Pemilikan swasta atas sawah muncul, hak-hak orang desa dipersempit dan kekuasaan pemimpin desa untuk mengatur lahan yang dapat ditanami semakin tinggi. Dengan banyaknya kedatangan bangsa asing, terutama bangsa Cina telah sedikit demi sedikit menggeser pertanian masyarakat Yogyakarta.

Mata pencaharian pokok penduduk Pakualaman adalah bercocok tanam, walaupun mereka mempunyai ladang atau areal pertanian yang dapat mereka kerjakan sebagai mata pencaharian pokok mereka, namun mereka juga tetap mempunyai mata pencaharian di bidang lain seperti menjadi pedagang, tukang kayu, pengrajin bambu, pengrajin batik dan tekstil. Perkembangan yang pesat pada industri batik dan tekstil dipengaruhi oleh banyaknya penduduk asing yang masuk dan tinggal di wilayah mereka dan mendirikan industri-industri batik dan tekstil. Tumbuhnya industri tersebut tentu membuka peluang lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat Pakualaman. Masyarakat sendiri lebih tertarik untuk menjadi buruh pabrik yang pekerjaannya lebih mudah bila dibandingkan dengan bercocok tanam, selain itu upah yang mereka dapatkan juga lebih besar bila dibandingkan dengan hasil dari tanaman mereka di ladang.

Dalam perkembangan selanjutnya, mata pencaharian menjadi masyarakat sebagai petani sudah mulai berkurang. Penduduk sudah mulai beralih pekerjaannya

sebagai pedagang atau buruh pabrik tekstil yang banyak didirikan oleh bangsa Cina. Berkurangnya jumlah penduduk yang pekerjaannya sehari-hari menjadi petani dapat dibuktikan dengan berkurangnya perbandingan jumlah hewan ternak yang berfungsi sebagai alat bantu dalam membajak sawah dan alat transportasi. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat tabel berikut ini:

Tabel 05
Jumlah Ternak Penggarap dan Alat Transportasi di Kadipaten Pakualaman 1901 (ekor)

Nama Daerah	Jenis Ternak Penggarap dan Alat Transportasi		
	Kuda	Lembu	Kerbau
Jagalan	12	10	-
Kepatihan	3	-	-
Kauman	17	-	-
Purwangan	56	16	-
Gunungketur	1	2	-
Margoyasan	-	-	-
Gendeng	-	1	-
Adikarto	477	6099	1566
Jumlah	566	6128	1566

Sumber : Inheemsche Bevolking Van Midden-Java en de Vorsten landen, Batavia : Departement Economische Zaken Landateukkerij. hlm. 98.

Perkembangan jumlah penduduk di Kadipaten Pakualaman yang sangat pesat ditambah dengan meluasnya perkembangan industri perkebunan swasta. Hal ini telah menyebabkan berkurangnya lahan pertanian milik perseorangan, sehingga sebagian besar penduduk justru hanya menjadi petani penggarap.³⁴ Mereka mendapatkan upah tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Untuk jumlah petani

³⁴ Haryadi, *loc,cit*

penggarap di wilayah Kadipaten pada tahun 1930 sebanyak 14 orang dari 100 jiwa yang ada.

Sistem ekonomi dalam masyarakat petani berdasarkan pada pertanian yaitu dengan bercocok tanam, peternakan atau perikanan yang menghasilkan pangan dengan kesatuan-kesatuan produksi yang tidak berspesialisasi. Artinya mereka tidak menanam tumbuhan hanya pada satu jenis tanaman saja, dan tidak beternak hanya dengan satu jenis hewan ternak saja. Para petani mengembangkan sistem pertanian yang berbeda, yaitu persawahan, kebun dan tegalan. Perkebunan pribumi hanya berupa tanah di sekitar rumah yang ditanami buah dan sayur. Hasil kebun diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup petani sehari-hari. Tidak sedikit petani yang menggantungkan hidup mereka dari hasil kebun yang diperoleh.

Daerah Adikarto yang merupakan daerah yang tanahnya cukup subur, sehingga banyak penduduknya yang mata pencahariannya dalam bidang pertanian. Dalam perkembangannya kehidupan pertanian penduduk berubah menjadi perkebunan tebu yang dibuka di Kabupaten Adikarto dan Distrik Pengasih pada tahun 1928. Berkembangnya perkebunan tebu tersebut karena daerah Adikarto dan Pengasih mendapatkan suplai air dari sungai Progo dengan jalan air yang dibangun di dekat daerah Sentolo. Saluran air inilah yang kemudian menjadi sarana peningkatan hasil pertanian dan perkebunan dari daerah Pengasih sampai ke daerah Adikarto, yang secara langsung hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Adikarto.

Selain itu di wilayah Pakualaman muncul golongan masyarakat khusus di dalam pekerjaan tertentu, yaitu menjadi seorang jagal³⁵. Riwayat para jagal dan pelindungnya mengarah kepada seorang yang berasal dari keturunan Majapahit, yang semula bernama Gus Yakup dan terkenal di kalangan para jagal sebagai Kiyai Jaga.³⁶ Golongan jagal yang ada di wilayah Pakualaman resminya mereka sebagai abdi dalem miji dan diorganisasikan oleh lurah dan bekel. Para pembantu mereka disebut naya dan tempat tinggal mereka ialah di tepi timur sungai Code, yang sering disebut dengan kampung Jagalan. Sampai tahun 1918, golongan jagal yang ada di Pakualaman mempunyai kedudukan yang penting di masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya peran penting para jagal dalam upacara adat di Keraton, mereka ditugaskan untuk memotong beberapa hewan persembahan yang digunakan di upacara tersebut.

C. Keadaan Pendidikan Masyarakat Pakualaman

Kondisi alam, kepadatan, pertumbuhan, angka kematian maupun kelahiran penduduk dan ekonomi merupakan peranan penting bagi kehidupan masyarakat, pendidikan juga mempunyai peranan penting untuk memajukan suatu masyarakat.

³⁵Jagal merupakan sebutan bagi seseorang yang pekerjaan sehari-harinya memotong hewan ternak. Selain untuk konsumsi masyarakat, mereka juga memotong hewan ternak yang digunakan sebagai persembahan dalam upacara adat, (Abdurachman Surjomiharjo, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe : Sejarah Sosial 1880-1930*, (Jakarta : Komunitas Bambu, 2008), hlm. 23).

³⁶ Ilmi Albiladiyah, *loc.cit*

Zaman kolonial, pemerintah Hindia Belanda menyediakan sekolah yang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di berbagai lapisan masyarakat.³⁷ Pendidikan bagi anak-anak Indonesia semula terbatas pada pendidikan rendah, akan tetapi kemudian berkembang secara vertikal sehingga anak-anak Indonesia melalui pendidikan menengah bisa mencapai pendidikan tinggi. Perkembangan pendidikan tidak berjalan lancar, seperti adanya peraturan pemerintah tahun 1818 yang mengharuskan diadakan peraturan-peraturan bagi pribumi agar tidak menghasilkan sekolah bagi anak-anak Indonesia.³⁸

Untuk wilayah Pakualaman sendiri hampir setengah abad pemerintahan Pakualaman belum mengenal pendidikan dengan sistem model Barat, tapi tetap mereka masih menggunakan sistem pendidikan secara tradisional.³⁹ Memasuki dunia pendidikan dan intelektual merupakan strategi Pakualaman menyesuaikan diri dan mempertahankan perannya di masyarakat di tengah perubahan zaman.⁴⁰ Pada awalnya pendidikan dianggap belum terlalu penting, pada saat itu yang menjadi pusat perhatian adalah pendidikan yang berpusat pada kesejahteraan keluarga, seperti orang

³⁷Sri Sutjiatiningsih, *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta : DEPDIKBUD, 1981), hlm. 41.

³⁸ Djohan Makmur, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*, (Jakarta : DEPDIKBUD, 1993), hlm. 50.

³⁹ Sri Sutjiatiningsih, *op,cit.*,hlm.44.

⁴⁰ Endriatmo Soetanto, *Keistimewaan Yogyakarta : yang diingat dan yang dilupakan*, (Yogyakarta : STPN, 2009), hlm. 63.

tua harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya.⁴¹ Cara orang tua melatih anak untuk menguasai cara-cara untuk mengurus diri (cara makan, buang air, berbicara, berjalan, berdoa) membekas dalam diri anak, karena berkaitan dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi. Sikap orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak.⁴²

Sebelum pendidikan Barat masuk, Pakualaman telah mengenal pendidikan Islam dan tradisional. Pengajaran diadakan setelah sholat maghrib di langgar hingga waktu sholat Isya tiba. Pendidikan agama Islam diajarkan pertama kalinya dalam lingkungan keluarga. Ayah dan ibu bertindak sebagai guru bagi anak-anaknya. Ayah dan ibu memberikan pendidikan akhlak berupa cerita atau kisah orang-orang saleh atau cerita tentang sejarah nabi, yang biasanya diberikan sebelum tidur atau pada waktu berkumpul dengan keluarga. Tidak jarang juga para orang tua memberikan hafalan bacaan ayat-ayat Al Quran atau doa-doa serta menuntun praktek ibadah shalat dengan cara mengajak anak-anaknya untuk turut shalat berjamaah dengan ayah di rumah atau di langgar atau masjid. Pendidikan semacam demikian umumnya

⁴¹ Bagi anak perempuan, mereka dituntut untuk bisa mengurus rumah dengan baik, sedangkan untuk anak laki-laki harus mengerti tentang tata krama Jawa, karena sebagian besar kaum laki-laki banyak menjadi hamba di Pakualaman, (Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 58.

⁴² Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 88.

dilaksanakan oleh keluarga-keluarga muslim walaupun cara atau materinya bervariasi.⁴³

Pendidikan dilanggar bersifat elementer, yaitu hanya mempelajari abjad huruf Arab atau menirukan apa yang dibaca oleh guru dari Al Quran. Murid diajar secara individual dan menghadap gurunya satu persatu, sedangkan yang lainnya duduk bersila disekeliling guru. Selain itu pendidikan pesantren dan madrasah juga banyak berkembang. Pendidikan tradisional Jawa pengajarannya meliputi baca tulis huruf Jawa, nembang, pendidikan budi pekerti dan tata susila.⁴⁴

Pada masa pemerintahan Paku Alam IV yaitu K.G.P.A. Suryo Sasraningrat, lingkungan Pakualaman sudah mulai mengenal pendidikan Barat. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman 2 orang abdi dalem sentono laki-laki dan perempuan ke sekolah sistem Barat, dan setelah mereka menyelesaikan sekolahnya mereka kembali ke Pakualaman dan kemudian menjadi guru dan dokter bagi kerabat Pakualaman.⁴⁵ Perkembangan pendidikan di Pakualaman sempat terhambat pada masa pemerintahan Paku Alam IV. Saat itu Paku Alam IV banyak menerima tamu asing yang datang, sehingga sering diadakan pagelaran kesenian dan pesta dalam Pakulamanan. Selain

⁴³Direktorat Syariah dan Nilai Tradisional Proyek Investasi dan Dokumentasi, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Sebelum Kedatangan Bangsa-bangsa Barat*, (Jakarta : DEPDIBUD, 1991), hlm. 49.

⁴⁴ Edi Setyawati, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Sebelum Kedatangan Bangsa-bangsa Barat*, (Jakarta : DEPDIBUD, 1991), hlm. 31.

⁴⁵ *Kota Yogyakarta 200 Tahun (7 Oktober 1756 - 7 Oktober 1956)*, (Yogyakarta : Kota Praja, 1956), hlm 66.

itu beliau juga sangat gemar mengumpulkan barang-barang mewah sebagai penghias istana, akibatnya banyak utang yang menumpuk dari pihak swasta maupun dari pemerintah Belanda.⁴⁶ Keadaan tersebut diperburuk dengan keluarga raja banyak yang jatuh miskin, hal ini dikarenakan masuk dan beredarnya candu dan kebiasaan berjudi di lingkungan Pakualaman yang dibawa oleh gaya hidup Barat. Dengan keadaan tersebut, jelas saja sangat merugikan bagi perkembangan kemajuan pendidikan di lingkungan kerabat Pakualaman.

Pada masa Paku Alam V pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan UU Agraria yang memberikan kebebasan berusaha bagi perkebunan swasta, dengan demikian tahap Liberalisme⁴⁷ mulai dilaksanakan.⁴⁸ Dalam memasuki tatanan kehidupan baru ini diperlukan tenaga yang berpendidikan yang dapat digunakan untuk melayani perkembangan pertumbuhan ekonomi. Untuk menghadapi keadaan tersebut, Paku Alam V menganjurkan sanak saudaranya untuk menuntut pendidikan formal yang banyak diselenggarakan pemerintah Belanda, agar nantinya dapat bekerja pada perusahaan-perusahaan milik Belanda. Selain menganjurkan, Paku Alam V juga telah mengirimkan putra-putranya ke sekolah Belanda, meskipun tidak

⁴⁶ Djoko Dwiyanto, *Puro Pakualaman : Sejarah, Kontribusi dan Nilai Kejuangan*, (Yogyakarta : Paradigma Indonesia, 2009), hlm. 100.

⁴⁷ Tahap Liberalisme adalah suatu sistem ekonomi yang menganjurkan kebebasan dalam melakukan usaha dan perniagaan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah sedikitpun. (Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2005), hlm. 293.

⁴⁸ Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia V*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1977), hlm.28.

semuanya dapat menempuh hingga pendidikan tinggi. Tahun 1882 Paku Alam V telah mengirimkan putranya yang bernama Notodirojo ke Batavia untuk mengikuti pendidikan Dokter Jawa dan selesai pada pada 1892. Setelah kembali ke Pakualaman mereka menjadi pegawai di perusahaan Belanda. Hal ini tentu saja sangat menarik minat dari para kerabat Pakualaman untuk mengikuti pendidikan Barat. Bahkan muncul wacana dari Paku Alam V siapapun itu (kerabat Pakualaman) yang tidak mengikuti pendidikan secara formal tidak akan mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan Pakualaman.

Tahun 1891 mulai banyak keluarga Pakualaman mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah Belanda, namun setelah selesai tidak semuanya bisa ditampung menjadi pegawai di Pakualaman. Mereka yang tidak tertampung sebagai pegawai dianjurkan untuk mencari pekerjaan diluar daerah, terutama di gubernemen.⁴⁹ Hal ini bertujuan untuk mendorong para kerabat Pakualaman mencapai kehidupan perekonomian yang lebih baik, dengan jalan mencari pekerjaan diluar praja Pakualaman. Para kerabat Pakualaman yang telah keluar dari sekolah Barat dan telah melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka telah mendirikan sekolah partikelir di daerah Pakualaman yang ada di Adikarto maupun yang ada di dalam wilayah pemerintahan Pakualaman sendiri. Pendirian sekolah tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di wilayah Pakualaman terutama bagi masyarakat Pakualaman yang kebanyakan menjadi murid di sekolah tersebut. Dari awal berdirinya sekolah-

⁴⁹ Djoko Dwiyanto, *loc.cit*

sekolah tersebut, semua biaya yang diperlukan ditanggung oleh pihak Pakualaman dan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah sedikitpun. Dengan kemajuan pendidikan formal di lingkungan Pakualaman, sedikit demi sedikit pendidikan tradisional mulai ditinggalkan, walaupun begitu masih bisa ditemui hasil kasusareraan yang bernilai tinggi.

Masa pemerintahan Paku Alam VII, beliau sangat memperhatikan pembinaan pendidikan terhadap kerabat Pakualaman, bukan hanya dengan cara memberi beasiswa pada anak yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, namun juga melakukan pembinaan secara langsung dengan mengawasi pendidikan pada para kerabat Pakualaman. Perkembangan pendidikan di Pakualaman berpengaruh pada peningkatan politik, ekonomi, sosial dan masyarakat. Secara politik dirasakan para golongan bangsawan dan priyayi, mereka mendapatkan kelas yang lebih tinggi di masyarakat dan memperoleh kepercayaan yang lebih dari pemerintah Belanda. Secara ekonomi sebagian masyarakat menjadi pegawai Pemerintah Belanda terutama para kaum bangsawan dan priyayi, sedangkan dari segi sosial masyarakat muncul gaya sosial yang lebih ke-Barat-baratan yaitu dengan gaya hidup modern sesuai dengan orang yang ingin berkarir dalam birokrasi kolonial Belanda.

Masyarakat sekitar Pakualaman tidak jauh berbeda dengan keadaan pendidikan di kerabat Pakualaman. Mereka juga telah mengenal pendidikan secara

tradisional.⁵⁰ Pendidikan mereka dapatkan di dalam masjid sehabis waktu sholat magrib hingga waktu sholat isya tiba. Mereka juga telah mengenal pendidikan di madrasah dan pesantren yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Untuk pendidikan Barat sendiri, mereka belum terlalu mengenal. Banyaknya sekolah-sekolah yang disediakan pemerintah tidak dapat menampung mereka untuk bersekolah disana. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai, selain itu dikarenakan juga biaya pendidikan di sekolah pemerintah yang relatif tinggi sehingga tidak dapat dijangkau.

Pendidikan Barat hanya bisa didapatkan bagi mereka para kaum keturunan Bangsawan dan kaum elit. Untuk masyarakat biasa mereka lebih memilih untuk mendapatkan pendidikan di langgar atau di masjid karena pendidikan disana tidak memerlukan biaya. Madrasah dan pesantren juga lebih diminati masyarakat karena biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan anak-anak mereka tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan sekolah yang disediakan oleh pemerintah.⁵¹ Keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah yang disediakan oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang sebenarnya tujuan dari kebijakan mereka adalah untuk membatasi pendidikan bagi kaum pribumi.

⁵⁰Sri Sutjiatiningsih, *op.cit.*, hlm.43.

⁵¹ Pendidikan di madrasah dan pesantren lebih diminati karena biaya yang tidak terlalu banyak, selain itu muncul anggapan di madrasah dan pesantren banyak diajarkan pelajaran tentang agama yang banyak dipraktikkan di kehidupan sehari-hari, tentu saja akan mempengaruhi budi pekerti anak-anak. Untuk pelajaran formal seperti di sekolah dianggap belum terlalu penting, (Endriatmo Soetarto, *Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Yang Dilupakan*, (Yogyakarta: STPN, 2009), hlm. 63.

Keadaan pendidikan di masyarakat Adikarto tidak jauh berbeda dengan keadaan pendidikan di wilayah dalam kota Pakualaman. Masyarakat juga sudah mengenal pendidikan secara tradisional sebelum mereka mengenal pendidikan secara formal yang dikenalkan oleh pemerintah. Pendidikan tradisional itu sendiri juga mereka dapatkan dari warisan para kerabat Pakualaman. Dalam pendidikan sistem tradisional juga diterapkan pendidikan agama, dan pada umumnya adalah pendidikan agama Islam. Interaksi dengan model pendidikan semakin terasa saat model pengajaran Eropa masuk dalam kehidupan masyarakat Adikarto, yang disesuaikan dengan sifat dualistis masyarakat Hindia Belanda, yang terkait dengan bahasa pengantar dan sistem pengajaran.

BAB III

SEKOLAH PARTIKELIR DI PAKUALAMAN

A. Awal Berdirinya Sekolah Partikelir

Perguruan Partikelir di Indonesia mempunyai riwayat sendiri, sejalan dengan riwayat yang diperoleh dari zaman kolonial dulu. Perguruan Partikelir di Indonesia lahir karena keadaan pertimbangan-pertimbangan keadaan kolonial yang mendorongnya. Adanya pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, yang berwujud sekolah-sekolah negara, terdapat juga pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan-yayasan pendidikan rakyat, yang berwujud perguruan-perguruan partikelir.¹ Kolonialisme sebagai kelanjutan sistem kapitalisme pada salah satu seginya merupakan usaha “membodohi” rakyat yang dijajah, agar bangsa yang dijajah itu bodoh, tambah bodoh, dan gampang dibodohi oleh para penjajah.

Sekolah-sekolah Hindia Belanda tidak mendidik anak-anak supaya menjadi orang yang berderajat tinggi, tidak untuk memelihara cita-cita kemanusiaan, tidak untuk menjadi manusia bangsa dan manusia yang sejajar dengan bangsa dan manusia didunia lainnya, namun justru sebaliknya. Pendidikan ditujukan untuk menjadikan anak jajahannya orang yang patuh, untuk menjadikan anak-anak Indonesia sebagai pelajar yang setia dan cakap untuk menjadi alat dan kaki tangan penjajah, yang dapat

¹Ki Soeratman, *Perguruan Swasta*, (Yogyakarta : Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1981), hlm. 06.

bekerja sebaik-baiknya untuk keuntungan tuannya.² Sistem pendidikan yaitu dengan cara mendekatkan lapisan atas pada kebudayaan Barat, agar mereka menjadi pegawai dan mereka dapat terbiasa dengan kebudayaan Barat. Susunan pendidikan bertujuan untuk memecah belah masyarakat terutama pemuda dari umur 5 th-25 th, sehingga membuat kaum terpelajar berjiwa ke-Baratan. Lapisan atas tidak mengenal jiwa kebangsaan dan kebudayaan bangsanya sendiri, bahkan mereka tidak mengenal bahasanya sendiri, karena di dalam keluarga digunakan bahasa Belanda untuk percakapan sehari-hari. Muncul anggapan kehidupan mereka tergantung dengan pengetahuan tentang bahasa Belanda.³

Diskriminasi yang jelas sekali tampak dalam wujud dan ukuran bangunan sekolahnya dari bangunan sekolah untuk *Hollandsch Inlandsche School* (H.I.S) tipe sekolah klas II dan bangunan sekolah Desa yang sangat mencolok. Murid-murid H.I.S dan lainnya yang berdasarkan sistem barat mendapat pelayanan yang jauh berbeda dengan anak sekolah kelas II dan sekolah Desa. Dalam pembagian anggaran juga terdapat diskriminasi, pada tahun 1936/1937 murid Sekolah Rakyat (S.R) Bumiputera ada 1.919.114 dengan biaya f 11.605.300 atau rata-rata setiap anak menerima f 6,04. Sedangkan murid S.R dengan sistem barat (seperti H.I.S dan semacamnya) ada 69.774 dengan biaya f 9.808.700 atau f 140,57 per orangnya. Selain itu, pendidikan juga bersifat tidak demokratis. Anak-anak tamatan S.R

² Prof. Zahara Idris, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Padang : Angkasa Raya, 1981). hlm. 11.

³ Suryosubroto, *Beberapa Aspek Dasar-dasar Kependidikan*, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 1982), hlm. 38.

Bumiputera tertutup pintunya untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Hanya sekolah H.I.S , *Schakel* dan *Europeesche Lagere School* (E.L.S) itulah yang diperbolehkan untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, walaupun sekolah tersebut jumlahnya juga sangat sedikit. Sekolah desa sangat rendah mutu pelajarannya, hanya sekadar memberi pelajaran membaca dan menulis. Biasanya setelah tamat belajar dan kembali ke kampung halamannya dalam beberapa tahun akan menjadi buta huruf kembali.⁴

Politik pendidikan Pemerintah kolonial Belanda menjadi salah satu usaha yang terpenting bagi kelangsungan penjajahan di Indonesia. Penjajahan menghendaki rakyat yang bodoh, untuk memudahkan pelaksanaan pemerasan dan penghisapan semua keuntungan-keuntungan yang di dapat dari Indonesia sendiri. Tujuan pendidikan tidak untuk memakmurkan dan kebahagiaan rakyat jajahan, melainkan untuk kepentingan si penjajah sendiri yang mulai menyadari bahwa mereka memerlukan beberapa tenaga kerja terlatih untuk menjalankan dan mengurus perusahaan milik kolonial Belanda itu sendiri.⁵ Tujuan seperti itu sudah jelas telah menentukan corak sistem pendidikan di Indonesia, yang terutama ditujukan untuk menjadikan anak-anak Indonesia sebagai alat-alat dan pelayan untuk kepentingan penjajah itu sendiri. Untuk pelayan penjajahan, diperlukan orang-orang yang

⁴ Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), hlm. 26.

⁵ Djohan Makmur, *op.cit*, hlm.73

bersemangat dan berjiwa budak. Diperlukan orang-orang yang sanggup untuk menjadi anak jajahan selama-lamanya.

Sistem pendidikan yang berlaku yaitu dengan menanamkan kepada anak-anak perasaan tidak percaya pada diri sendiri, tidak percaya pada bangsanya sendiri, dan tidak percaya pada rakyatnya sendiri. Ditanamkan perasaan dan anggapan bahwa hanya bangsa Belanda dan bangsa asing umumnya yang mampu membuat suatu perubahan. Dirinya dan bangsanya hanyalah manusia yang rendah, yang tidak mungkin mampu berbuat sesuatu. Dengan menanamkan anggapan yang salah pada perbuatan para pahlawan nasional, anak-anak dilarang mengenal kebudayaan bangsanya sendiri, dan seringkali memanipulasi sejarah tanah airnya. Semuanya itu bertujuan untuk mengalihkan hati dan pikiran, agar tertanam dalam-dalam perasaan rendah diri, perasaan hina dan jiwa budak.⁶

Keadaan yang seperti inilah yang mendorong timbulnya usaha rakyat Indonesia untuk mendirikan sekolah-sekolah partikelir, sebagai usaha diluar Pemerintah kolonial.⁷ Timbul karena rasa tidak puas terhadap keadaan dan perlakuan yang tidak adil dari pemerintah. Keadaan itu juga yang memberi corak dan sifat serta cara perjuangannya perguruan partikelir di Indonesia. Kekurangan sekolahan yang sangat mencolok itu, lebih-lebih ditekankan pada pikiran dan pandangan orang, bahwa perguruan partikelir itu sebagai usaha untuk menambah jumlah sekolah-

⁶ Sutari Imam Banardig, *Sejarah Pendidikan*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1955), hlm. 50

⁷ Ki Soeratman, *op,cit. hlm. 15*.

sekolah yang sudah ada. Timbullah inisiatif rakyat Indonesia untuk mendirikan perguruan-perguruan partikelir yang pada umumnya mempunyai kedudukan dan corak sebagai berikut⁸:

1. Sebagai usaha penambah sekolahan, didorong oleh keadaan yang sangat terbatas, karena kurangnya sekolah-sekolah bagi anak-anak Indonesia yang sangat mencolok
2. Sebagai perwujudan kehendak dan cita-cita untuk mendidik anak-anak Indonesia, karena mengetahui keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam dasar dan sistem pendidikan sekolah-sekolah Pemerintah. Timbul dari kesadaran akan keadaan masyarakat, karena pendidikan kolonial yang berlaku dipandangnya sangat bertentangan dengan dasar dan cita-cita rakyat Indonesia.

Di dalam negara yang demokratis, maka tiap-tiap penduduk berhak untuk memelihara aliran hidupnya masing-masing, baik yang berhubungan dengan agamanya, pandangannya atau pendirian hidupnya, maupun yang mengenai cita-cita kebudayaan atau kemasyarakatannya, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan negara, seperti yang diatur dalam Undang Undang Dasar, atau membahayakan tertib-damainya masyarakat. Pemeliharaan cita-cita hidup yang beraneka warna itu, biasanya dilaksanakan dengan pendidikan dan pengajaran, yang sifat atau isinya, bentuk serta cara penyelenggaraan disesuaikan dengan cita-cita hidup masing-masing itu. Jadi

⁸Ryadi Goenawan, *Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Jakarta : DEPDIBUD, 1993), hlm. 93.

dengan demikian secara prinsipial hak mendidik dan mengajar anak hakekat ada pada orangtua. Oleh karena itu maka hak untuk memilih pendidik bagi anak-anak juga ada pada setiap orang tua.

Faktor yang mendorong lahirnya perguruan partikelir juga dikarenakan di dalam masyarakat masih sangat kurang adanya sekolah, baik yang diadakan pemerintah maupun oleh pihak masyarakat sendiri. Dengan adanya kekurangan sekolah itu maka timbul inisiatif sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan suatu perguruan partikelir. Perguruan semacam ini tidak mempermasalahkan kualitas pendidikan, karena pada dasarnya pola penyelenggaraannya tidak berbeda dengan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah, bahkan cenderung menyesuaikan dan menyamakan dirinya dengan sekolah-sekolah pemerintah. Dengan demikian munculnya sekolah-sekolah partikelir secara kuantitatif telah menambah kesempatan menerima pendidikan untuk masyarakat, namun secara kualitatif tidak menambah jenis pendidikan. Sekolah partikelir yang ada dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu ;

Pertama, sekolah partikelir yang pada awalnya hanya bermaksud untuk menambah jumlah sekolah yang ada, untuk sekadar mencukupi kehausan orang-orang memasuki sekolah. Orang pada umumnya lebih gampang melihat dan merasakan kekurangan jumlah sekolah, daripada memandang dan merasakan keterbatasan yang ada dalam sistem pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah.⁹ Oleh karena

⁹Subarjo, *Pendidikan Abad ke 20 dengan Latar Belakang Kebudayaan*, (Jakarta : Mutiara, 1981), hlm 20.

itulah, usaha dan inisiatif partikelir untuk menambah jumlah sekolah, biaya dianggap sebagai sifat dan fungsi yang primer dari fungsi dan sifat lainnya yang pokok. Dasar-dasar dan sistem pendidikan kurang menjadi persoalan pokok, bahkan umumnya hanya ingin menyamai sekolah Belanda saja. Bahkan terkadang lebih bersifat Belanda dari Belanda sendiri, lebih kolonial dari sekolah kolonial sendiri, karena keinginan untuk mengejar persamaan dengan sekolah-sekolah Pemerintah. Perguruan partikelir semacam ini dapat dinilai sebagai penambah jumlah sekolah yang sangat dirasakan kurang. Dari segi pendidikan dan perjuangan nasional dapat berarti menguatkan barisan kolonial. Perguruan partikelir semacam itu juga menjadi lapangan usaha untuk mencari keuntungan dengan menjadikan perguruan sebagai perusahaan dan anak-anak murid sebagai alatnya.¹⁰

Kedua, perguruan partikelir yang diusahakan oleh golongan agama, lahir karena didorong oleh maksud dan usaha mengembangkan agama, disamping menambah jumlah sekolah yang ada. Perguruan partikelir ini membedakan dirinya dengan sekolah Pemerintah dengan pemberian pelajaran agamanya. Dalam hal syarat-syarat masuk dan yang lainnya biasanya sama atau berusaha untuk menyamai sifat dan tingkat pelajaran di sekolah Pemerintah. Dalam pengajarannya diberikan ajaran agama, bukan agar mendapatkan pelajaran agama yang cukup, melainkan hanya karena kekurangan sekolahan. Orang-orang lebih berharap anak-anak mereka mendapatkan pelajaran yang sama dengan apa yang diajarkan disekolah Pemerintah.

¹⁰ Moch. Tauchid, *op.cit. hlm19*

Ketiga, perguruan partikelir, lahir karena kesadaran akan keadaan penjajahan yang melihat keterbatasan-keterbatasan dalam bidang pendidikan. Tidak hanya karena kekurangan sekolah, tapi karena dasar dan sistem pendidikan yang sangat berbahaya bagi cita-cita kemerdekaan Bangsa dan Rakyat. Mereka melihat pendidikan kolonial sebagai racun yang membahayakan dan menghalangi tercapainya cita-cita nasional bangsa Indonesia. Perguruan semacam ini lahir karena kesadaran yang besar di hati rakyat untuk membedakan dirinya dengan sekolah yang didirikan Pemerintah kolonial Belanda. Demikianlah sifat dan perjuangan perguruan partikelir yang mempunyai dasar-dasar dan pandangan hidup, serta mempunyai cita-cita yang jelas, disamping usaha-usaha partikelir yang berusaha untuk menambah jumlah sekolahan yang ada.

B. Sekolah Partikelir Pakualaman

Pakualaman merupakan suatu pusat Pemerintahan yang baru di Yogyakarta, sudah tentu Pemerintahan yang baru itu harus mengangkat alat Pemerintah yang serba baru juga.¹¹ Karena belum banyak orang-orang yang pantas untuk dipercaya memegang dan bertanggungjawab atas Negara, maka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku-Alam I sendiri memberikan pelajaran segala sesuatu pengetahuan

¹¹ Djoko Dwiyanto, *Puro Pakualaman : Sejarah, Kontribusi dan Nilai Kejuangan*, (Yogyakarta : Paradigma Indonesia, 2009), Hlm.10.

dan ilmu tata-negara kepada para putra dan santana. Adapun yang ikut serta dan menjalani usaha K. G. P. A. A. Paku-Alam I, yaitu¹²:

1. Seorang pegawai bernama Ngabei Kawiredjo, ia memberikan pelajaran tentang kesusastraan Jawa.
2. Seorang Penghulu bernama Kyai haji Mustahal, memberikan pelajaran ilmu agama Islam.

Dalam waktu yang singkat Kadipaten Pakualaman dapat melengkapi pegawai yang cukup cakap untuk dapat menjalankan pemerintahan pada saat itu. Sistem yang diusahakan K. G. P. A. A. Paku-Alam I tersebut menjadi suatu teladan bagi para putera-santana dan para pegawai, dan sistem ini dapat berjalan terus dalam lingkungan Pakualaman. Pada masa K.G.P.A.A Paku Alam II perkembangan dan kemajuannya dapat menunjukkan hasil yang memuaskan. Salah satu hasil dari sistem tersebut adalah para putra Santana dapat menjabat pangkat tentara (*Legioen*) yang lebih tinggi, yang sederajat dengan tentara bangsa Belanda pada saat itu.¹³

Pada akhir abad ke 19, kira-kira 1892 *Legioen* (tentara) dibubarkan oleh pemerintah Hindia-Belanda. Karena pembubaran *Legioen* ini, maka dari kebijakan K.G.P.A.A Paku-Alam V berusaha, agar para putera-santana Pakualaman dapat diterima menjadi murid pada sekolah-sekolah Belanda, yang dilanjutkan di sekolah H. B. S di Jakarta, kemudian selanjutnya ke Perguruan Tinggi di negeri Belanda.

¹² Kota *Jogjakarta 200 Tahun (07 Oktober 1756 – 07 Oktober 1956)*, Kota Praja Jogjakarta, 1956, hlm. 65.

¹³ Ryadi Goenawan, *loc. cit*

Bagi anak-anak Pegawai Pakualaman disediakan sebuah sekolah partikelir, yang setingkat dengan sekolah Gubernemen yang ada diluar daerah Yogyakarta. Sekolah tersebut dibawah pimpinan Ngabei Wirohaksoro sebagai Kepala Sekolah. Selain sekolah tersebut ada beberapa sekolah partikelir lagi yang sengaja disediakan untuk anak-anak rakyat dalam daerah Pakualaman. Sekolah-sekolah partikelir yang ada dalam daerah Kadipaten Pakualaman yaitu;¹⁴

- a. Sekolah Surjengyuritan Lor yang tempatnya berada di pendopo Kanjeng Pangeran Surjaningyurut, putra nomer empat dari K.G.P.A.A Paku Alam I. Tepatnya sekolah ini ada di jalan Purwanggan Wetan berada di sebelah selatan jalan yang sekarang ini termasuk cepuri Pura Pakualaman bagian belakang. Dari Surjengyuritan Lor berpindah tempat dirumah R. Panji Suraminarso, yang sekarang ada di depan Puro Pakualaman sebelah timur, dan bertempat disebelah jalan Jayaningprangan. Perkembangan selanjutnya sekolah ini di pindah lagi ke dalam, yaitu di Bangsal panjang, sebelah Tenggara Bangsal Sewa Taman (pendopo Puro Pakualaman) dengan nama sekolah Jero Gede¹⁵
- b. Sekolah Padmosekarnan yang berada di kampung Gunungketur dan letak sekolah tersebut ada di sebelah timur jalan Gunungketur. Untuk namanya sendiri, nama tersebut diberikan hanya karena pada saat itu bertepatan dengan masa pemerintahan K.G.P.A.A Paku Alam V. Pada saat itu ada seorang

¹⁴ *Op. cit*, hlm. 72.

¹⁵ Letak sekolah bisa di lihat di lampiran nomer 07, hlm. 108.

Wedana Reh Reksawibawa merangkap Reh Langenpraja, bernama Ngabei Padmasukarna. Mungkin karena sekolah tersebut ada di kompleks rumah Ngabei Padmosekarna, sekolah tersebut terkenal dengan nama Sekolah Padmosekarnan.

Pendidikan di Adikarto yang masih merupakan wilayah Pakualaman keadaannya tidak jauh berbeda dengan keadaan pendidikan di Pakualaman. Sebelum masyarakat mengenal sistem pendidikan Barat, masyarakat sudah mengenal pendidikan secara tradisional. Seiring dengan masuknya pendidikan Barat di wilayah Adikarto, pendidikan langsung bisa berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bermunculan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Akhir abad 19 masyarakat mulai dikenalkan dengan sekolah dasar yang didirikan pemerintah. Sekolah tersebut adalah sekolah kelas 1, sekolah kelas 2, sekolah Desa, sekolah Lanjutan, sekolah Sambungan, sekolah Pribumi berbahasa Belanda dan kursus Guru Desa.

Sifat dualistis yang dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda tentu sangat berpengaruh bagi perkembangan pendidikan di Adikarto. Sifat dualistis itu sendiri terkait dengan bahasa pengantar dan sistem pengajaran. Untuk sekolah jenis sekolah Eropa berbahasa Belanda dan sekolah pribumi berbahasa Belanda kelak disiapkan untuk fungsi-fungsi dalam sektor-sektor yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengatarnya. Sistem dualistis dalam perkembangannya berdampak sosial yang menjadikan bahasa ini menjadi lambang status di lingkungan masyarakat. Sistem

pendidikan yang berkembang di masyarakat terikat dengan sistem dualisme dan plurarisme sosial ekonomi dengan disertai adanya diskriminasi warna kulit.

Beberapa sekolah yang didirikan pemerintah di wilayah Adikarto ternyata belum bisa menampung semua anak di daerah Adikarto yang menginginkan masuk ke sekolah. Hal tersebut mengakibatkan munculnya sekolah liar yang salah satunya didirikan oleh Pakualaman di daerah Pakualaman. Sekolah tersebut jenisnya adalah sekolah partikelir yang sederajat dengan sekolah Ongko Loro yang didirikan pemerintah.¹⁶

Sekolah Ongko Loro didirikan bersamaan dengan sekolah partikelir yang ada di Pakulaman, yaitu pada tahun 1892. Sekolah Ongko Loro ini diperuntukkan untuk anak-anak dari pegawai Pakualaman yang tujuannya untuk mempersiapkan lulusannya untuk menjadi carik desa (perangkat desa).

C. Suasana Belajar di Sekolah Partikelir Pakualaman

Keadaan sekolah partikelir yang ada di dalam naungan Pakualaman baik yang ada di wilayah Puro Pakualaman maupun yang ada di daerah Adikarto dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁷

1. Gedung sekolah;

Gedung sekolah Surjengyuritan menggunakan sebuah bangunan yang ada di dalam Puro Pakualaman sedangkan sekolah Padmosekarnan berada di luar Puro

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

namun masih merupakan daerah Pakualaman. Sekolah yang berada di wilayah Adikarto menggunakan rumah salah satu penduduk yang ada disana. Bangunan yang ada berisi barang-barang keperluan belajar mengajar yang cukup lengkap. Walaupun sudah tersedia barang-barang untuk keperluan sekolah, namun barang-barang tersebut masih sangat sederhana sekali.

2. Peralatan Sekolah;¹⁸

Peralatan yang terdapat di sekolah meliputi beberapa meja pendek namun panjang cukup untuk duduk bersila lima orang anak. Sebuah papan tulis setiap kelas yang lengkap dengan kapur tulisnya.

3. Buku-buku pelajaran¹⁹

Buku yang masih berupa tulisan tangan asli hanya tersedia untuk pegangan para guru. Semua materi pelajaran di tulis di papan tulis oleh guru, sedangkan murid-murid mempergunakan batu tulis dan anak batu tulis untuk mencatat materi pelajaran yang diberikan guru. Judul buku yang digunakan yaitu :

a. Wulang Reh karangan Paku Buwana IV²⁰

Berisi tentang hukum kesusilaan. Pada waktu itu kerajaan Mataram sudah tidak mempunyai kekuasaan apa-apa, semua kekuaasaanya di pegang oleh pemerintah Belanda. Daerah kerajaan sudah menjadi sempit sekali, Raja

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Abu Ahmadi, *Sejarah Pendidikan*, (Semarang : CV Toha Putra, 1985), hlm.18.

hanya merupakan boneka dari pemerintah jajahan. Pandangan di dalam buku ini ditujukan kepada keluarga raja dan kepada pegawai kerajaan, dan pada masyarakat sekitarnya pada umumnya. P.B. IV menerangkan kebenaran dan kenyataan yang terlihat di dalam kehidupan yang fana ini, beliau memusatkan penulisannya pada soal kesusilaan, yaitu hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Di samping itu juga memberikan pelajaran tentang watak yang berdasarkan tingkah laku perbuatan dan gerak-gerak manusia. Caranya dengan mengamati kebiasaan orang tersebut melalui cara berjalan, cara duduk, tingkah laku dan cara berbicara.

b. Tripama karangan dari Mangkunegara IV²¹

Dalam buku ini dinyatakan dengan tegas, bahwa pada pemuda harus meniru atau melaksanakan kehidupan yang bersifat kepahlawanan. Pahlawan seperti Panembahan Senapati dapat menguasai diri di dalam segala tindakannya lahir dan batin dan selalu ramah tamah terhadap sesama manusia. Pahlawan seperti Sumantri, menunjukkan kebenaran yang luar biasa dan setia pada cita-citanya, dan tidak taut jika harus berkorban nyawanya.

c. Wedatama Wirawijata karangan Mangkunegaran IV²²

Buku ini berisi tentang petunjuk bagi para pemuda yang harus menyiapkan diri untuk menjadi anggota masyarakat dan manusia sebagai makhluk yang ber-Tuhan. Pendidikan disini yang dikemukakan sudah bersifat

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

lahir dan batin. Pengajaran tentang sikap seseorang terhadap kehidupan, terutama sebagai calon anggota masyarakat. Para anggota masyarakat harus berusaha untuk memiliki kedudukan, kepandaian dan kebahagiaan. Manusia harus bertindak susila, misalnya;

- 1). Melakukan sesuatu dengan tidak terlalu panjang memikirkan hasilnya
 - 2). Menerima semua cobaan dengan lapang dada
 - 3). Percaya dengan keadilan yang diberikan oleh Tuhan
- d. Buku Emboen, karangan dari guru Belanda (G.F. Lavell) dan guru bahasa Melayu (m. Taib). Buku ini terdiri dari 50 materi yang meliputi pendidikan moral seperti cinta akan binatang, kehematan, hormat terhadap orang lain, hukuman atas kesalahan, pelanggaran, hadiah untuk kejujuran, dan sebagainya yang ceritanya diambil dari kejadian dalam kehidupan sehari-hari.²³
- e. Taman Sari, karangan J. Kats.²⁴

Berisi tentang cerita-cerita yang disampaikan guru kepada anak-anak kelas rendah. Buku ini adalah buku bimbingan pendidikan moral mengenai kelakuan yang baik dan buruk, sifat-sifat manusia seperti kejujuran, kerajinan, kepatuhan, kesombongan, dan sering dalam bentuk cerita binatang yang sentimental.

²³ Nasution, *op. cit*, hlm. 65

²⁴ *Ibid*, hlm 66.

4. Daftar pelajaran;

Sekolah Kelas Dua yang dimaksud sebagai Sekolah Rakyat yang memberi pendidikan sederhana bagi seluruh rakyat. Sekolah ini akan mempersiapkan berbagai macam pegawai rendah untuk kantor pemerintah dan perusahaan swasta, dan tidak jarang pula sekolah ini berfungsi untuk mempersiapkan guru bagi Sekolah Desa. Sekolah ini menjadi lembaga pendidikan bagi golongan elite di kalangan golongan rendah. Sekolah kelas dua hanya memiliki kurikulum yang sederhana, yang meliputi pelajaran membaca, menulis dalam bahasa Melayu dan berhitung. Pelajaran agama dilarang walaupun ruangan kelas dapat digunakan untuk pendidikan agama di luar jam sekolah. Awalnya Sekolah Kelas Dua lama pendidikannya hanya 3 tahun, namun dalam perkembangannya lama pendidikan di tambah 2 tahun, agar kelak dapat mempersiapkan muridnya untuk memasuki Kweekschool (Sekolah Pendidikan Guru). Kurikulumnya juga mulai bertambah dengan diajarkannya pelajaran menggambar, dan pelajaran menyanyi serta ilmu bumi diajarkan di kelas 3. Ilmu alam diberikan di kelas 4 dan 5 dan terutama mengenai pengetahuan yang sederhana tentang tanaman, binatang dan tubuh manusia.²⁵

Pelajaran yang diberikan tidak terlalu lengkap seperti yang ada di sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Karena tujuan dari adanya sekolah partikelir yang sederajat dengan sekolah Ongko Loro ini hanya setelah lulus dari sekolah ini mereka bisa membaca, menulis dan menghitung. Khusus untuk lulusan sekolah

²⁵ *Ibid.* hlm 62

partikelir yang ada di daerah Adikarto mereka dipersiapkan untuk menjadi Lurah atau perangkat desa lainnya.

5. Para guru²⁶;

Terdiri dari Mantri Guru (kepala Sekolah) dengan para guru pembantu. Pada saat itu, para guru di sekolah partikelir dianggap oleh pemerintah sebagai guru yang magang (calon) pegawai negeri dan mudah untuk pindah bekerja di perkebunan milik orang asing. Mereka tidak memiliki ijazah khusus untuk mengajar di sekolah ini, walaupun demikian tidak sedikit dari mereka yang berijazah. Karena sekolah ini didirikan dan dalam naungan Pakualaman maka tidak sedikit pula para kerabat Pakualaman yang berperan dalam mengurus sekolah partikelir ini. Para kerabat Pakualaman yang ikut terlibat membawahi para guru dan kepala sekolah sehingga proses perkembangan sekolah ini masih dalam kontrol dan pengawasan dari para kerabat Pakualaman.

6. Jumlah murid²⁷;

Permulaan tahun ajaran 1 Syawal pada kelas 1 kurang lebih 100 anak, sedangkan pada kelas 2 kurang lebih 75 anak, dan pada kelas 3 kurang lebih 50 anak. Jadi jumlah murid dalam sekolah itu terdiri dari 225 anak, jumlah ini terdapat pada sekolah yang ada di Pakualaman. Untuk jumlah murid yang ada di sekolah partikelir di Adikarto lebih sedikit, karena sekolah tersebut hanya diperuntukkan bagi anak-anak dari para pegawai Pakualaman. Nama guru-guru

²⁶ Jogjakarta, *op. cit.* Hlm. 69.

²⁷ *Ibid.*

yang terakhir tercatat yang telah mengajar di sekolah partikelir yang ada di Pakualaman yaitu: R.M. Prawiraningrat (putera K.P.H. Sasraningrat), R.M.Djojengutara, Djojoprayitno, Martiatmo, Sastrosutardjo, Tukinun, Manggil. Dengan Kepala Sekolah yang bernama Raden Djajengmandarjo, yang terkenal dengan nama panggilan Gus Gurit.

7. Uang sekolah;

Peraturan uang sekolah diadakan perbedaan menurut penghasilan dari orang tua murid, biaya sekolah partikelir di Pakualaman dapat dilihat dari tabel sebagai berikut;

Tabel 07
Besar biaya sekolah partikelir di Pakualaman 1932 (gulden)

Kategori	Biaya Sekolah	Penghasilan Orang tua
I	f 0,40	f 25,- keatas
2	f 0,25	f 15,- sampai > f 25,-
3	f 0,10	f 10,- sampai > f 15,-
4 A	f 0,05	f 5,- sampai > f 10,-
4 B	gratis	Kurang dari f 5,-

Sumber : Schoolgelt tarief van de Pakoe Alamsche, Seranai Arsip Pakualaman No. 2153

8. Gaji Guru;

Gaji bagi guru di sekolah partikelir tergantung dari jumlah penerimaan uang sekolah, namun serendah-rendahnya f 25. Gaji guru tiap bulannya tergantung jumlah penerimaan uang sekolah, tapi serendah-rendahnya f. 25, yang biasanya

dibagi untuk beberapa guru. Gaji yang diterima guru sekolah partikelir yang ada di daerah Adikarto dapat di lihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 08
Nama dan Gaji Guru Sekolah Partikelir Ongko Loro Adikarto (gulden)

Nama Guru Pengajar	Masa Dinas 1 Agustus 1936		Gaji dari 1 agustus 1936
	Tahun	Bulan	
Sardjowarjojo	19	3	f 2h
Paiman	18-	6	F 19
Halim Siswohardjono	-	-	F10.-
Soemosoekarto	27	2	F 27,50
Toekidjo	2	4	F 11
Badroen mangkoesiswojo	19	5	F 24.-
Soekardi	2	4	F 11.-

Sumber : Arsip Puro Pakualaman No. 2153, tentang penyediaan alat-alat sekolah

Para guru disekolah partikelir pada saat itu oleh Pemerintah dianggap magang (calon) pegawai negeri dan mudah untuk pindah bekerja dilapangan pengusaha-pengusaha perkebunan milki orang asing. Dalam perkembangan selanjutnya sekolah tersebut masih tetap dibuka untuk masyarakat sekitar Pakualaman. Hingga Indonesia mencapai kemerdekaan, sekolah yang ada di wilayah Pakualaman yang di daerah Yogyakarta menjadi sekolah Pakualaman 1 dan Pakualaman 2. Sekolah yang ada di daeah Adikarto tidak dapat diketahui kedaannya setelah Indonesia mereka.

D. Perkembangan Sekolah Partikelir Pakualaman²⁸;

Sekolah partikelir Pakualaman berdiri dari tahun 1892, dua diantaranya terdapat di wilayah Pakualaman yang terdapat di daerah Yogyakarta, berdekatan dengan Puro Pakualaman yang menjadi tempat kediaman Paku Alam. Satu sekolah partikelir yang juga didirikan oleh Pakualaman terdapat di daerah Adikarto, Kulon Progo. Awal berdirinya sekolah partikelir Pakualaman ini ternyata belum bisa menarik perhatian masyarakat sekitar, hanya sebagian kecil jumlah masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sekolah partikelir Pakualaman. Hal ini disebabkan anggapan yang berkembang di masyarakat, bahwa sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Belanda lebih baik dibandingkan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pihak swasta. Para masyarakat ingin sekali menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Belanda, namun karena keterbatasan biaya dan fasilitas sekolah yang belum memadai sehingga tidak bisa menampung semua murid yang ingin belajar di sekolah-sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Belanda tersebut.

Sekitar tahun 1900, mulai banyak masyarakat yang tertarik dan mempercayakan anak-anaknya untuk disekolahkan di sekolah partikelir Pakualaman. Hal ini dikarenakan, mereka melihat lulusan dari sekolah partikelir Pakualaman mendapatkan banyak ilmu dari sekolah partikelir Pakualaman. Lulusan yang dihasilkan sekolah partikelir paling tidak mereka bisa menulis dan membaca huruf abjad dan Jawa, serta dapat menghitung dengan angka. Selain itu biaya yang harus

²⁸ Jogjakarta, *op, cit.* hlm. 75.

dikeluarkan cukup terjangkau bagi masyarakat, dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan di sekolah Pemerintah Belanda yang jelas lebih mahal. Melihat perkembangan sekolah partikelir yang semakin lama semakin membaik, muncul perhatian dari Pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda takut dalam sekolah tersebut disisipkan materi yang mengandung nilai nasionalisme pada Indonesia, dikhawatirkan nantinya terdapat banyak pemberontak pribumi yang menentang kekuasaan Pemerintah Belanda. Permasalahan tersebut ditanggapi Pemerintah Belanda dengan mengadakan pengawasan bagi sekolah-sekolah partikelir yang ada di Yogyakarta, karena banyak sekolah partikelir yang berdiri selain yang ada di wilayah Pakualaman.

E. Pengawasan Sekolah

Dalam perkembangannya, sekolah partikelir telah mencapai kemajuan yang cukup pesat. Selain mulai munculnya sekolah-sekolah partikelir yang lain, juga meningkatnya jumlah murid yang bersekolah di sekolah partikelir. Hal ini tentu telah menarik perhatian dari pemerintah, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berupa peraturan yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi sekolah-sekolah partikelir yang mulai bermunculan. Kebijakan tersebut berupa ordonasi yang mengatur mulai dari pengajaran, aturan untuk berdirinya sekolah itu sendiri hingga sangsi-sangsi yang diberikan bila terjadi pelanggaran-pelanggaran. Isi dari peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

²⁹Batavia Centrum, *Ordonasi Pengawasan Sekolah Partikelir* (Staatsblad 1932 No. 494, 495 dan 533, dioebah dan di tambah dalam Staatsblad 1933 No. 372

1. Aturan Pengajaran

Seseorang yang ingin menjadi guru dari sekolah partikelir, calon guru harus membuat surat ijin sekaligus pemberitahuan untuk mengajar. Surat tersebut harus diserahkan kepada bagian Residen, bukan ditujukan kepada pemerintah daerah. Sebagai kepala pemerintah daerah harus menunjukkan tempat memasukkan surat pemberitahuan ijin mengajar, pemerintah daerah juga harus menunjukkan laporan masuknya surat tersebut kepada *amtenar* pengawasan jika diminta. Bagi orang-orang Eropa dilarang untuk melakukan pengajaran untuk orang pribumi. Pengajaran yang diberikan dalam satu ruangan kelas harus meliputi lebih dari 3 anak. Pemberian pelajaran agama di sekolah harus tetap mengikuti aturan ordonasi yang telah dibuat. Bagi guru pengajar yang masih terikat kerja (mengajar) di tempat lain, harus memasukkan surat pemberitahuan untuk bestuur sekolah tersebut. Surat pemberitahuan tersebut harus disertai ijin dari kepala pemerintahan daerah, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Direktorat Pengajaran dan Ibadat.

Kepala pemerintahan gewest mempunyai wewenang untuk melarang atau mengizinkan seseorang untuk memberikan pengajaran di sekolah partikelir. Larangan tersebut harus terlebih dahulu meminta pertimbangan komisi sekolah Eropa atau komisi sekolah Bumiputra. Pengajaran yang diberikan harus dalam pengawasan pemerintah, dan yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan adalah :

dan 450 dan mulai berlaku pada staatsblad 1933 No. 449). (Jakarta : Balai Pustaka, 1934).

- a. *Amtenaar-amtenaar* pemerintah dalam negeri
- b. *Amtenaar-amtenaar* inspeksi sekolah
- c. *Amtenaar-amtenaar* pengawas sekolah Tionghoa³⁰

Seorang amtenaar yang ditugaskan untuk mengawasi sekolah harus diperbolehkan mengetahui dan mengawasi proses belajar mengajar yang sedang berlangsung di dalam kelas. Selain itu, seorang amtenaar diperbolehkan mengetahui segala sesuatu tentang sekolah partikelir tersebut, termasuk kurikulum dan anggarannya.

2. Tentang Sekolah

Jika seseorang atau suatu lembaga akan mendirikan sekolah, mereka harus membuat surat pemberitahuan dan ijin dari pemerintah daerah. Pemberitahuan tersebut harus dilakukan oleh pemimpin lembaga yang akan mendirikan sekolah. Bestuur yang membuat surat pemberitahuan harus mempunyai kedudukan di pemerintahan Hindia Belanda. Selain pemimpinnya, guru atau kepala sekolah dari sekolah yang akan didirikan tersebut juga bisa membuat surat pemberitahuan. Nama sekolah yang sama dengan nama sekolah pemerintah terlebih dahulu juga harus meminta ijin dari Direktur Pengajaran dan Ibadat. Sekolah yang akan didirikan harus di tempat yang sesuai, artinya dapat mendukung proses belajar mengajar. Untuk murid-murid dari sekolah yang tidak mendapatkan ijin akan dipindah ke sekolah lain yang telah mendapat ijin. Segala sesuatu untuk membuat surat pemberitahuan tidak

³⁰ Sekolah Tionghoa didirikan dan disediakan untuk masyarakat yang masih keturunan Tonghoa. Sekolah tersebut tentu saja muridnya terdiri dari anak-anak dari keluarga keturunan Tionghoa yang banyak tinggal di Yogyakarta.

akan dikenai biaya segel, kecuali untuk pemberitahuan untuk persamaan nama sekolah.

3. Aturan Hukuman

Bagi seseorang yang melanggar aturan yang tercantum dalam ordonasi ini dihukum kurungan paling lama 8 hari atau di denda sebesar 25 rupiah, jika:

- a. Memberi pengajaran tanpa memasukkan surat pemberitahuan yang diisyaratkan
- b. Mengisi formulir ijin mengajar dengan keterangan tidak benar
- c. Lalai dalam memberi keterangan
- d. Mendirikan sekolah sebelum memasukkan surat pemberitahuan
- e. Mengisi formulir ijin mendirikan sekolah dengan keterangan yang tidak benar
- f. Memakai nama sekolah yang sama dengan nama sekolah pemerintah tanpa melakukan ijin terlebih dahulu
- g. Tidak mengizinkan amtenaar untuk melakukan pengawasan pada sekolah
- h. Tetap mengadakan pengajaran walaupun tidak mendapat ijin dari pemerintah daerah

4. Aturan Penutup

Ordonasi ini merupakan suatu ordonasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengawasi sekolah-sekolah partikelir yang banyak bermunculan, yang dari awal pendiriannya tanpa pengawasan dari pemerintah.

5. Aturan Perubahan

Sekolah partikelir yang sudah mendapatkan ijin untuk mendirikan dan memberikan pengajaran di bebaskan dari kewajiban memasukkan surat pemberitahuan. Sekolah yang didirikan pada saat ordonasi mulai berlaku, dibebaskan memasukkan surat pemberitahuan.

Dilihat dari ordonasi tersebut terlihat jelas bahwa pemerintah sangat memperhatikan adanya sekolah-sekolah partikelir yang mulai bermunculan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang disediakan pemerintah. Untuk menjadi tenaga pengajarnya sendiri harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam ordonasi. Seperti halnya harus membuat surat ijin yang ditujukan untuk Residen afdeeling, dan seseorang tidak akan diberikan ijin mengajar bila orang tersebut masih tercatat sebagai guru di sekolah lainnya. Terdapat satu contoh surat pemberitahuan yang dibuat seorang calon guru yang akan memberikan pelajaran di sekolah partikelir. Permohonan surat ijin tersbut dibuat oleh seseorang yang tinggal di lingkungan Pakualaman bernama Suparno. Surat tersebut ditujukan kepada Paduka Regent Patih Pakualaman.³¹ Untuk pendirian sekolah partikelir juga harus melakukan ijin dan pemberian nama tidak boleh sama dengan nama sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Jika ada yang melanggar peraturan yang telah tercantum di ordonasi akan dikenakan hukuman sesuai dengan hukuman yang tertera diordonasi.

³¹ Seranai Arsip Puro Pakualaman No. 2153, tentang pendirian sekolah partikelir.

Reglemen Pengajaran Eropa (*Staatsblad* 1894 No. 192) dalam pasal 26 yang memberi aturan tentang pengajaran yang diberikan oleh bangsa Eropa kepada bangsa Eropa juga, dan ordonasi tanggal 3 November 1880 (*Staatsblad* No. 201) yang telah diubah dengan *Staatsblad* 1912 No. 286, menetapkan aturan tentang pengajaran yang diberikan oleh bangsa Eropa kepada bangsa Bumi Putera dan bangsa lain yang disamakan dengan mereka, sedangkan tentang pengajaran lain lama sekali *Goebernemen* tidak mengadakan aturan. Keadaan baru bisa berubah setelah keluarnya ordonasi tanggal 28 Maret 1923, *Staatsblaad* No. 136. Menurut ordonasi itu, Kepala pemerintahan *gewest* boleh melarang seseorang memberi pengajaran, jika perlu untuk kepentingan umum.

Perkembangannnya, ordonasi tersebut tidak dapat menghilangkan perbuatan yang melanggar isi dari ordonasi tersebut. Sering sekali terdengar seseorang memberi pengajaran dalam bilik yang sama sekali tidak layak, biasanya gurunya bukan saja tidak memiliki surat ijazah yang diperlukan, tetapi mereka juga tidak mampu memberi pengajaran yang layak bagi anak-anak didiknya. Karena hal tersebut, maka dengan *Staatsblaad* 1932 No. 494 pengawasan *Goebernemen* tentang pengajaran partikelir kemudian diubah agar Pemerintah dapat mencegah hal-hal yang kurang baik dalam pengajaran partikelir. Ordonasi tersebut menetapkan bahwa guru harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Kepala pemerintahan daerah, jika mereka akan memberikan pengajaran. Selain itu juga ditentukan beberapa syarat tentang semua yang berhubungan dengan sekolah itu sendiri.

Baru saja aturan itu keluar sudah timbul sikap kurang setuju dengan ordonasi tersebut, terutama dari kalangan Bumi Putera. Mereka keberatan jika seorang guru sebelum mengajar harus membuat surat ijin pada Pemerintah, dan setelah membuat surat ijin seorang guru belum pasti diterima atau tidak untuk memberikan pengajaran di sekolah partikelir. Melihat sikap masyarakat pribumi yang seperti itu, akhirnya pemerintah mengadakan perubahan pada aturan ordonasi yang menyangkut tentang ijin bagi guru untuk memberikan pengajaran. Peraturan tersebut akhirnya diubah dengan guru tidak perlu membuat surat ijin untuk mengajar, namun mereka harus membuat surat pemberitahuan kepada pemerintah bahwa mereka memberikan pengajaran di sebuah sekolah partikelir.

Setelah ordonasi tersebut dikeluarkan dan sudah mengalami banyak perubahan, ternyata ada beberapa masalah yang di timbulkan oleh seorang guru dari sekolah partikelir yang melanggar aturan dalam ordonasi. Contoh kasusnya ada seorang guru dari sekolah partikelir Pakualaman yang ternyata sudah menjadi guru di sekolah lain. Melihat hal tersebut, pemerintah Hindia Belanda langsung mengirimkan surat ke Pakulaman yang isinya berkaitan dengan masalah guru tersebut. Pemerintah Hindia Belanda menganjurkan agar pihak Pakualaman mengeluarkan guru tersebut dari sekolah partikelir bawahan Pakualaman. Hal ini dikarenakan tindakan seorang guru tersebut telah melanggar ordonasi pengawasan sekolah partikelir hasil dari kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang melarang seorang guru yang masih mengajar di sekolah lain melakukan pengajaran di sekolah partikelir. Setelah kasus ini diselidiki, ternyata memang benar guru tersebut telah

melanggar aturan ordonasi, lalu Regent Patih Pakualaman Raden Mas Tumenggung Haryo mengeluarkan surat pernyataan bahwa guru yang bersangkutan dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai guru di sekolah partikelir.³²

³² Senarai Arsip Puro Pakualaman No. 2187, tentang pengawasan sekolah partikelir di Pakulaman.

BAB IV

PENGARUH SEKOLAH PARTIKELIR PAKUALAMAN 1892-1942

Akhir abad ke-19 sekolah yang biasa disebut “sekolah modern” sangat terbatas sekali.¹ Keluarga-keluarga terkemuka demi kemajuan karir anak mereka sering harus menyewa guru privat, untuk memberikan pengajaran formal bagi anak-anak mereka di rumah. Sementara itu di beberapa kalangan orang Belanda makin terasa perlunya memperkembangkan pendidikan dengan gaya Barat, salah satunya untuk keperluan perluasan birokrasi dan jaringan administrasi pemerintah kolonial. Adanya kebijakan sistem politik etis, pemerintah mulai memperhatikan pendidikan masyarakat pribumi, walaupun tujuan mereka tetap demi keuntungan mereka sendiri untuk mendapatkan tenaga kerja yang terdidik dengan gaji yang relatif rendah, yang nantinya dipekerjakan untuk pemerintah Belanda.² Masyarakat yang pada awalnya hanya mengenal sistem pendidikan secara tradisional kemudian mendapat pengaruh dengan masuknya pendidikan dengan sistem Barat, yang kemudian dibangunnya beberapa sekolah pemerintah dengan sistem Barat.

Sekolah yang mula-mula diperkenalkan ialah sekolah kelas Dua, yang akan mendidik calon-calon pegawai rendah dan sekolah kelas Satu, yang

¹ Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia V*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hlm. 125.

² Wasty Soemanto, *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1983), hlm. 48.

diperuntukkan bagi anak-anak dari golongan masyarakat atasan.³ Disamping itu ada pula sekolah rendah yang terutama disediakan bagi anak-anak Eropa. Sekolah yang didirikan pemerintah makin lama makin bisa menarik perhatian, sekolah tersebut dianggap sebagai alat untuk dapat memasuki lingkungan hidup baru (hidup kepriyayian) bagi masyarakat golongan bawah, dan penambah legitimasi bagi masyarakat golongan atas. Awalnya memang hanya masyarakat yang berasal dari keluarga yang berada yang bisa mendapatkan pendidikan, selain biaya yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah, jumlah sekolah juga masih sedikit. Keinginan untuk mencari pilihan lain dalam dunia pengajaran dan pendidikan serta kebutuhan yang nyata terhadap sekolah “modern” dan sekuler memberi dorongan munculnya sekolah swasta. Sekolah sebagai lembaga pendidikan bukan saja dapat menghubungkan berbagai perbedaan.⁴ Melihat keadaan seperti itulah maka banyak beberapa lembaga mendirikan sekolah partikelir, seperti sekolah partikelir yang didirikan oleh Pakualaman.

Tahun 1892 Pakualaman telah mendirikan 3 buah sekolah partikelir, baik yang ada di wilayah Pakualaman yang berdekatan dengan kota Yogyakarta, juga di wilayah Pakualaman yang ada di Adikarto yang berada di wilayah Kulon Progo. Sekolah yang ada di wilayah Pakualaman dekat dengan Yogyakarta

³ H. Baudet, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 183.

⁴ Selo Soemadjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1981), hlm. 39.

dinamakan sekolah partikelir Suryenyuritan Lor dan Padmosekarnan yang disediakan untuk masyarakat Pakualaman, sedangkan yang di wilayah Adikarto merupakan sekolah Ongko Loro yang disediakan untuk anak-anak dari pegawai Pakualaman.⁵ Walaupun sekolah tersebut hanya merupakan sekolah dasar rendahan, namun adanya sekolah partikelir yang ada di Pakualaman tentu sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Pakualaman. Sekolah ini semata-mata tidak hanya sebagai penambah sekolah untuk memenuhi kebutuhan jumlah sekolah yang dibutuhkan masyarakat agar mendapatkan pendidikan, namun sekolah ini juga tentu berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Pakualaman selanjutnya. Sekolah partikelir ini menyebabkan pengaruh di bidang sosial, ekonomi, dan budaya, dampak secara jelas dapat di lihat sebagai berikut:

1. Pengaruh Bidang Sosial

Dengan adanya sekolah partikelir yang ada di Pakualaman tentu saja menambah jumlah anak-anak yang mendapatkan pendidikan di lingkungan sekitar Pakualaman. Walaupun Jumlah sekolah yang ada tidak bisa dijadikan sebagai gambaran bagaimana keadaan pendidikan sebenarnya, karena sekolah tersebut bisa saja muridnya tidak lebih dari sepuluh anak, tetapi jumlah sekolah ini dapat memberi sekedar penunjuk tentang tingkat keterlibatan badan pemerintah dan partikelir lainnya dalam pengajaran gaya Barat.

Sekolah yang tujuannya untuk mengajarkan berbagai keahlian dan orientasi yang sangat bersifat kepegawaiaan, artinya ijasah dikaitkan dengan

⁵ *Kota Yogyakarta 200 tahun (07 Oktober 1756-07 Oktober 1956)*, Kota Praja Yogyakarta, hlm. 72.

tingkat dalam hierarki birokrasi. Pekerjaan dan kedudukan tidak semata-mata tergantung pada kemampuan, tetapi sangat terpaut dengan ras, orang kulit putih harus diutamakan dan keturunan anak orang berpangkat harus didahulukan.⁶ Hal ini menyebabkan bermunculan tenaga terdidik dan terpelajar yang sama sekali berada diluar sistem kolonial, walaupun mereka dilatih untuk menjadi tenaga inti dalam sitem itu.

Mendapatkan pendidikan walaupun hanya setingkat sekolah dasar tentu akan menaikkan derajat seseorang di lingkungan masyarakat. Banyaknya masyarakat yang telah mendapatkan pendidikan telah memunculkan banyak kaum elit baru, yaitu kaum terpelajar yang dapat meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan hidup masyarakat.⁷ Terutama untuk lulusan sekolah partikelir yang ada di Adikarto yang lulusannya memang dipersiapkan untuk menjadi lurah atau perangkat desa lainnya. Dengan menjadi lurah atau perangkat desa tentu akan dipandang terhormat di lingkungan masyarakat yang masih menganggap jabatan seorang lurah atau perangkat desa merupakan jabatan yang terhormat di kalangan masyarakat biasa.

Sekolah partikelir yang di sediakan untuk anak-anak dari pegawai Pakualaman tersebut telah banyak meluluskan muridnya yang kemudian banyak diantara mereka menjadi lurah atau perangkat desa lainnya. Lulusan sekolah partikelir yang ada di wilayah Pakualaman yang di Yogyakarta walaupun mereka tidak menjadi lurah atau perangkat desa lainnya, dengan mendapatkan pendidikan

⁶Pembagian penduduk pada jaman pemerintahan Hindia Belanda dapat dilihat di lampiran nomer 11, hlm.112.

⁷ Selo Soemardjan, *loc.cit.*

mereka tetap mendapat pandangan yang lebih baik di bandingkan anak-anak keluarga yang tidak mendapatkan pendidikan sama sekali. Selain itu dengan ketrampilan dan pengetahuan yang didapat dari sekolah partikelir tersebut mereka dapat memperoleh lebih banyak peluang pekerjaan yang banyak disediakan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Sekolah yang membuka pintu bagi kelanjutan pendidikan, ternyata banyak juga menghasilkan seseorang dari masyarakat golongan bawah menjadi pejabat dengan keahlian yang dimiliki. Sekolah dalam hal ini telah menyebabkan pelebaran mobilitas sosial dengan pengaruh yang lebih terbatas.⁸ Orang baru dimungkinkan untuk memasuki lapisan sosial baru yang lebih tinggi. Kecenderungan bagi terbukanya jalan yang lebih lebar bagi mobilitas sosial terdapat pula dalam dunia kepegawaian. Anak-anak dari pegawai yang rendah, karena pendidikan yang mereka peroleh, mempunyai kesempatan untuk melebihi tingkat yang pernah dicapai orang tua mereka.

Perubahan sosial di zaman kolonial memang bersifat multi fungsi dan tidak konsisten. Di samping terjadinya proses pembaharuan struktural, juga yang lebih penting yaitu proses pengabdian nilai-nilai. Di samping terjadinya usaha penyesuaian kultural, antara aspirasi-aspirasi tradisional dengan kenyataan politik, muncul pula gerakan penolakan terhadap situasi kolonial tersebut. Penolakan ini dilakukan, baik yang ingin mempercepat proses timbulnya masyarakat yang baru, maupun oleh pihak yang menginginkan kembalinya ketentuan lama. Tetapi dalam suasana seperti ini unsur dinamisasi dalam masyarakat mulai berjalan dan

⁸ Riyadi Gunawan, *Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 85.

bergerak ke arah tercapainya integrasi yang lebih luas, yang tidak terikat hanya kepada kesetiaan lama mulai lancar.

Pada awal abad ke-20 kalangan perangkat daerah (bupati) mulai mendidik anaknya untuk dapat berkarir diluar bidang kepamongan, sedangkan para priyayi rendah mendidik anak mereka agar berkarir di kepamongan. Setelah keluar dari sekolah, beberapa peluang untuk berkarir terbuka bagi mereka. Sebagian ada yang bergabung ke dalam sistem kolonial, dan yang sebagian lainnya mencari pekerjaan lain di luar pemerintahan kolonial. Perubahan sosial juga terjadi pada kalangan ulama dan pemimpin agama. Bukan keturunan yang dipentingkan lagi, melainkan keunggulan dalam ilmu agama dan ilmu yang berhubungan dengan dunia mistik. Dalam proses pengadaptasian agama ke dalam struktur sosial dan politik tradisional, keunggulan dalam ilmu agama juga mulai dikembangkan⁹. Pada zaman kolonial terjadi semacam pencairan dan mobilitas status sosial dalam masyarakat. Kekuasaan (jabatan) dalam pekerjaan terbuka bagi orang baru untuk masuk. Pendidikan, pengaruh luar, komersialisasi, dan urbanisasi membuka kesempatan ini. Tetapi perubahan yang fundamental yang menyangkut nilai-nilai dari stratifikasi sosial tidaklah terjadi. Mobilitas yang dilakukan perseorang tidak terjadi. Dalam hal ini perubahan di daerah desa dirasa lebih penting.¹⁰

Awalnya Paku Alam VII mendirikan sekolah partikelir yang ada di wilayah Pakualaman maupun yang ada di daerah Adikarto adalah untuk menambah jumlah sekolah yang disediakan untuk masyarakat Pakualaman.

⁹ Sutedjo Bradjanagara, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Yogyakarta : Kongres Pendidikan Indonesia, 1956), hlm. 67.

¹⁰ Sartono Kartodirdjo, *op. cit*, hlm. 155.

Dengan begitu semakin banyak penduduk Pakualaman mendapatkan pendidikan, sehingga bisa bekerja di pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah, tidak harus menunggu lowongan pekerjaan yang disediakan oleh Pakualaman. Meningkatnya pendidikan masyarakat Pakualaman berkat adanya sekolah partikelir ini tentu dapat merubah angka buta huruf di masyarakat. Angka buta huruf yang dimaksud adalah jumlah orang yang menjadi penduduk di wilayah Pakualaman yang tidak bisa membaca aksara. Hal ini tentu saja akan menyulitkan kehidupan masyarakat itu sendiri, terutama dalam bidang pekerjaan masyarakat. Dengan buta huruf, mereka hanya bisa menjadi budak bagi para penguasa, yang hanya dipandang sebagai tenaga rendahan dengan upah yang sangat kecil. Selain itu di mata masyarakat seorang buta huruf dipandang status sosialnya sangat rendah. Contoh data jumlah buta angka buta huruf di salah satu wilayah Pakualaman yaitu daerah Adikarto dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 09

Jumlah Angka Buta Huruf di Daerah Adikarto 1904 (orang)

Tempat	Jumlah Total Penduduk	Jumlah Penduduk Buta Huruf
Brosot	36	31
Pandawan	15	13
Sranggahan	20	10
Bantingan	18	16
Galur	16	12
Sidakan	50	40
Dalin	17	15

Sumber : Surat dari sekolah partikelir Adikarto berupa laporan tentang pemberantasan buta huruf di Adikarto 1904. Seranai Arsip Puro Pakualaman No. 1516

Melihat data tersebut angka buta huruf di daerah Adikarto masih cukup banyak, pada saat data tersebut di buat sekolah di Adikarto belum lama berdiri dan belum bisa berkembang, sekolah dari pemerintah juga belum banyak yang didirikan. Setelah sekolah partikelir yang didirikan Pakualaman di Adikarto telah lama berdiri dan sudah berkembang, mulai menunjukkan perubahan dalam bidang pendidikan masyarakat. Salah satunya dengan adanya pendataan jumlah buta huruf yang kembali di lakukan di daerah Adikarto. Walaupun sekolah partikelir yang ada di Adikarto hanya disediakan untuk anak dari para pegawai Pakualaman, namun tidak sedikit juga masyarakat umum Adikarto yang bersekolah di sekolah partikelir yang ada di Pakualaman. Selain itu juga tidak sedikit masyarakat Adikarto yang bersekolah di sekolah pemerintah yang mulai banyak berdiri di wilayah Adikarto. Pendidikan masyarakat dengan ditandai berkurangnya jumlah angka buta huruf di masyarakat, jumlah tersebut dapat dilihat dari data sebagai berikut :

Tabel 10
Jumlah Angka Buta Huruf di Daerah Adikarto 1942 (orang)

Tempat	Jumlah
Brosot	6
Pandawan	7
Sranggahan	4
Bantingan	8
Galur	5
Sidakan	30
Dalin	11

Sumber : Daftar hasil angka buta huruf yang di lakukan di daerah Adikarto 1942. Seranai arsip Puro Pakualaman No. 2065

Setelah dilakukan pendataan kembali pada tahun 1942, melihat data diatas ternyata sekolah partikelir yang didirikan oleh Pakualaman mampu mengurangi angka buta huruf di masyarakat. Terlihat dari berkurangnya jumlah angka pada data buta huruf pada tahun 1904 yang kemudian dilakukan pendataan kembali pada tahun 1942. Walaupun dalam hal ini sekolah partikelir Pakualaman tidak sendiri dalam memainkan perannya di masyarakat, berkembangnya pendidikan masyarakat bukan hanya karena adanya sekolah partikelir yang didirikan Pakualaman, tapi juga berkat sekolah pemerintah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda yang tentu saja juga menggunakan sistem Barat.

Selain adanya dampak positif terdapat pula dampak negatifnya. Adanya sekolah partikelir di Pakualaman yang menggunakan sistem sekolah Barat, yang mengutamakan pelajaran-pelajaran formal yang dibutuhkan dalam pekerjaan, pelajaran tentang kesusastraan Jawa dan pelajaran tentang agama mulai sedikit demi sedikit berkurang dan mulai ditinggalkan masyarakat. Selain itu juga ada beberapa golongan priyayi yang masih muda mulai terpengaruh dengan budaya Barat, dan berperilaku melenceng dengan kebudayaan Jawa.¹¹ Sudah merupakan gejala umum di dalam masyarakat para anggota dalam suatu kelas masyarakat cenderung meniru kelas yang lebih tinggi. Kaum priyayi sangat bangga berperilaku, berpakaian dan hidup seperti kaum bangsawan. Para pegawai pemerintahan Belanda serta beberapa orang yang bekerja di perusahaan swasta juga ingin sekali untuk hidup, berpakaian dan berbicara seperti orang Belanda.

¹¹Bambang Suwondo, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta : DEPDIBUD, 1977), hlm. 20

Banyak diantara mereka lebih fasih berbahasa Belanda daripada bahasa Jawa ataupun Melayu. Selain itu mereka juga menerima gagasan-gagasan Barat mengenai demokrasi, kebebasan dan persamaan

Masyarakat juga mulai kecewa dengan singkat para priyayi baru yang umurnya masih tergolong muda ini. Masyarakat mengharapkan para golongan priyayi baik yang baru atau lama, baik yang muda dan tua, semua tingkah laku, akal dan budinya bisa dijadikan panutan atau contoh yang baik bagi masyarakat, bukan justru memberi contoh yang tidak baik bagi masyarakat sekitar. Karena sudah menjadi keharusan tugas bagi golongan priyayi memberikan contoh dan panutan yang baik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹²

Hal ini menyebabkan protes dari beberapa kalangan priyayi, karena ditakutkan nantinya dapat mempengaruhi kepribadian masyarakat yang mulai mengikuti budaya Barat, yang tentu saja berseberangan dengan nilai budaya Jawa. Masuknya pendidikan dengan sistem barat telah menggeser pendidikan secara tradisional yang mengedepankan pengajaran tentang moral dan nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Setelah adanya protes tersebut, dimulai kembali pengajaran tradisional yang dilakukan di serambi masjid atau mushola yang banyak mengajarkan persoalan agama dan kesusastraan Jawa. Walaupun begitu, paginya anak-anak tetap diperbolehkan mengikuti sekolah di sekolah partikelir di Pakualaman, yang pelajarannya menggunakan sistem Barat. Dengan begitu diharapkan masyarakat Pakualaman tetap mendapatkan pendidikan dengan sistem

¹² *Ibid*

Barat yang banyak memberikan pelajaran formal di kelas, namun juga tanpa meninggalkan kebudayaan dan agamanya.

Terlalu banyaknya ajaran dengan sistem Barat yang tidak diseimbangi dengan ajaran tentang budaya Jawa dan agama, lama-kelamaan akan dapat merubah pola pikir masyarakat terhadap kehidupannya sendiri. Seorang anak yang terlalu banyak dididik dengan sistem Barat akan merasa asing dengan kebudayaannya sendiri, akan merasa asing dalam bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat dalam lingkungannya sendiri.¹³

2. Pengaruh Bidang Ekonomi

Adanya sekolah partikelir yang didirikan oleh Pakualaman selain berdampak sosial tentu saja akan berdampak bagi perekonomian masyarakat Pakualaman dan sekitarnya. Memperoleh pendidikan walaupun hanya setingkat sekolah rendah, angka pengangguran yang ada di Pakualaman tentu akan berkurang. Bertambahnya jumlah angka masyarakat yang mempunyai pekerjaan yang lebih baik tentu saja akan menaikkan kesejahteraan masyarakat. Pekerjaan baru yang di dapatkan oleh masyarakat tentu pekerjaan yang lebih baik bila diukur dari upah kerja yng di dapat dan pekerjaan yang dikerjakan. Sebelumnya masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan hanya bekerja sebagai petani diladang mereka atau bekerja di ladang orang lain yang tentu saja hanya mendapatkan upah yang sedikit.

Lulusan dari sekolah partikelir Ongko Loro yang di Adikarto dengan menjadi Lurah dan perangkat desa lainnya, tentu akan bisa membantu

¹³ Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta : INIS, 2004), hlm. 24

perekonomian orang tua mereka. Para guru yang sebelumnya tidak dapat mengajar disekolah karena kurangnya sekolah yang ada, sedangkan mereka lulusan sekolah guru, dengan adanya sekolah ini tentu saja mereka dapat memperoleh pekerjaan mengajar di sekolah partikelir di Pakulaman. Dengan berkembangnya pendidikan masyarakat, terdapat pekerjaan masyarakat yang cukup bervariasi, diantaranya seperti pekerjaan sebagai juru tulis dan mantri, mandor dan opas, petani, pedagang bahkan ada beberapa orang dari golongan masyarakat rendahan bisa menjadi pegawai tinggi.¹⁴

Struktur sosial daerah pedesaan sangat berbeda dengan daerah perkotaan. Para pejabat pamong praja beserta anggota stafnya berada di puncak lapisan sosial masyarakat. Mereka umumnya adalah orang-orang yang berasal dari kota dan tetap berorientasi di kota, dan tidak mempunyai minat dengan bidang pertanian dan kehidupan pedesaan. Diantara penduduk tani, kepala desa dan para pembantunya mempunyai status sosial yang tinggi dalam masyarakat. Diluar kelompok pamong desa, stratifikasi sosial di dasarkan pada dasar pemilikan tanah. Yang menempati kedudukan sosial pertama dan tertinggi adalah kuli kenceng, mereka yang memiliki sawah yang bisa diairi, kelas ini juga terdiri dari mereka yang hanya memiliki tanah kering yang mudah ditanami, akan tetapi status mereka berada sedikit di bawah para pemilik tanah sawah. Tingkat sosial berikutnya adalah kuli karangkopek, yang tidak memilki sawah tetapi hanya pekarangan. Selanjutnya kuli indung atau kuli gandok yang sama sekali tidak

¹⁴Sartono Kartodirdjo, *op. cit*, hlm. 150.

memiliki tanah tetapi memiliki rumah di tanah orang lain. Kelas sosial yang terakhir adalah indung tlosor, yang tidak memiliki tanah maupun rumah, menumpang pada keluarga lain dan bekerja pada mereka sebagai imbalannya

Sejak akhir abad ke-19 beberapa jenis mobilitas dalam masyarakat, baik secara geografis maupun sosiologis telah terjadi. Secara geografis terlihat dari perpindahan tempat tinggal dan kerja makin lama makin banyak dilakukan. Transmigrasi, migrasi intern dan urbanisasi menunjukkan adanya keinginan untuk keluar dari lingkungan hidup sebelumnya. Hal ini dikarenakan pengaruh ekonomi asing dan kepadatan penduduk, mobilitas dalam kerjapun juga banyak terjadi. Sebagian masyarakat yang menjadi petani mulai tertarik dengan pekerjaan sebagai pedagang, walaupun masih menjadi pedagang kecil-kecilan. Jenis pekerjaan tukang dan pelayan pun telah bertambah banyak juga.¹⁵

Peralihan kerja dan perpindahan tempat mungkin saja tidak membawa pengaruh bagi kedudukan seseorang dalam penilaian masyarakat yang melakukannya. Tetapi ada juga peralihan tersebut membawa perubahan bagi kedudukan seseorang. Begitu seorang yang pindah ke kota dan mendapat kerja yang baik akan naik harga dirinya di mata masyarakat desanya, demikian juga jika seorang dalam pekerjaannya hingga mencapai kesuksesan. Dalam hal ini terjadilah semacam mobilitas sosial vertikal yang menunjukkan peningkatan.

¹⁵Abdurachman Surjomiharjo, *Sejarah Perkembangan Sosial Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta : Yayasan untuk Indonesia. 2006), hlm. 50

3. Pengaruh Bidang Kebudayaan

Pendidikan dan kebudayaan sering diibaratkan sebagai dua sisi dari sekeping mata uang, kalau pendidikan merupakan satu sisi dari keping mata uang tersebut maka kebudayaan merupakan sisi yang lainnya. Begitu pula yang sebaliknya, kalau kebudayaan merupakan satu sisi dari keping mata uang tersebut maka pendidikan merupakan sisi yang lainnya. Perumpamaan tersebut menggambarkan eratnya hubungan atau kaitan di antara pendidikan dengan kebudayaan. Contoh kenyataannya adalah apabila dalam dunia pendidikan terjadi perubahan-perubahan maka hal ini pun secara langsung maupun tak langsung akan terjadi dalam dunia kebudayaan.¹⁶

Eratnya hubungan antara pendidikan dan kebudayaan juga sering digambarkan dalam suatu hubungan timbal balik artinya hubungan yang saling mempengaruhi. Implikasinya apabila terjadi fenomena-fenomena tertentu dalam dunia pendidikan maka fenomena ini akan berpengaruh bagi dunia kebudayaan, demikian pula yang sebaliknya, bila terjadi fenomena-fenomena tertentu dalam dunia kebudayaan maka fenomena ini akan berpengaruh bagi dunia pendidikan. Setelah masyarakat banyak mendapatkan pendidikan dengan sistem Barat, terjadi perubahan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat Pakualaman. Selain sifat dan sikap masyarakat yang mulai ke-Barat-baratan, terjadi juga perubahan pandangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Terutama pandangan bagi anak-anak perempuan yang sebelumnya pendidikan dianggap tidak penting bagi anak perempuan. Bagi masyarakat di pandang anak-anak perempuan tidak perlu

¹⁶Suparman, Kaitan Kebudayaan dengan Pendidikan, pada [http://www.google.com/Kebudayaan dan Pendidikan](http://www.google.com/Kebudayaan%20dan%20Pendidikan). Diakses pada tanggal 20 Maret 2012.

mendapatkan pendidikan secara formal, karena kelak mereka hanya mengurus anak dan keluarga di rumah, tidak perlu bekerja karena sudah ada suami yang selalu memberi nafkah. Perkembangan pendidikan ini mengubah anggapan tersebut, sudah banyak anak-anak perempuan mulai di amukkan ke sekolah oleh orang tuanya, dengan harapan kelak anak perempuan juga bisa membantu perekonomian keluarga dengan bekerja, selain yang bisa dilakukan anak laki-laki.

Pandangan pada anak-anak pada umumnya, dulunya orangtua di pedesaan memandang anak-anak mereka sebagai modal tenaga ekonomi yang bisa dimanfaatkan dalam bidang pertanian yang menjadi pekerjaan orangtua mereka. Adanya sekolah dengan sistem Barat ini ternyata telah mengubah semua pandangan mereka, mulai ada pandangan para anak-anak kelak bisa dijadikan sebagai modal ekonomi dengan sekarang membiayai pendidikan mereka terlebih dahulu. Melihat keadaan seperti ini, sudah jelas para orangtua sudah meninggalkan sikap tradisional menyuruh anak-anak mereka membantu pekerjaan orangtuanya dalam bertani tanpa memberikan mereka pendidikan, dan agar kelak anak-anak mereka juga bisa menjadi petani seperti orangtua mereka. Sekarang orangtua memberikan pendidikan anak-anak mereka agar mendapat ketrampilan agar kelak siap bersaing di dunia kerja.¹⁷

Di lingkungan anak-anak muncul ketertarikan pada pendidikan terutama dengan sistem Barat hingga memunculkan pandangan merupakan suatu keharusan tiap anak harus bersekolah. Ketertarikan tersebut muncul juga di kalangan anak-anak, banyak sekali anak-anak yang usianya belum cukup untuk

¹⁷Abdurachman Surjomiharjo, *loc. cit.*

bersekolah mendesak orangtua mereka untuk memasukkan mereka ke sekolah seperti kakak mereka yang sudah masuk ke sekolah formal dengan sistem Barat. Sayangnya, ada beberapa anak yang memasuki sekolah hanya ingin mendapat sebutan sebagai seorang murid, daripada untuk mendapatkan ilmu dan ketrampilan yang di berikan di sekolah partikelir Pakualaman.

Dari lingkungan orangtua juga muncul suatu anggapan orangtua dikatakan kejam jika mempunyai anak yang umurnya sudah memasuki umur sekolah tapi tidak disekolahkan, masalah tersebut tentu juga akan menjadi cibiran dari masyarakat lingkungan sekitar. Sehingga para orangtua yang mempunyai anak yang sudah memasuki umur sekolah langsung memasukkan anak mereka ke sekolah-sekolah yang tersedia, seperti sekolah partikelir yang didirikan oleh Pakualamn. Selain karena desakan dari anak mereka sendiri, juga takut bila mendapat cibiran masyarakat sekitar. Para orangtua juga beranggapan anaknya harus mempunyai ketrampilan dan ilmu yang bisa di dapatkan dari bangku sekolah. Melihat hal tersebut, sudah jelas kesadaran dari orangtua akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sudah cukup tinggi.¹⁸

Untuk lingkungan pergaulan masyarakat juga sudah berubah, dulunya mereka hanya mau bersosialisasi dengan orang-orang yang masih tinggal di daerah yang sama dengan mereka. Setelah mereka mendapatkan pendidikan, pergaulan mereka meluas. Mereka tidak saja hanya ingin bersosialisasi dengan

¹⁸Bambang Suwondo, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta : DEPDIBUD, 1977), hlm. 30.

orang-orang sederhana, tapi juga mulai mengenal orang-orang baru dari daerah lain dengan lingkungan yang baru pula.

BAB V

KESIMPULAN

Pakualaman terbentuk dari adanya perjanjian Giyanti antara pihak Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwana III dengan kelompok Pangeran Mangkubumi, yang terdiri dari Pangeran Mangkubumi, Pangeran Wijil, Pangeran Krapyak dan Pangeran Hadiwijoyo. Isi dari perjanjian tersebut adalah wilayah Mataram dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Yogyakarta sendiri dibagi menjadi dua wilayah yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Pakualaman berdiri terpisah dengan keraton Yogyakarta, walaupun begitu Pakualaman tetap menghormati keraton sebagai wilayah pemerintahan yang lebih dulu berdiri sebelum Pakualaman. Sistem pemerintahan di Pakualaman mirip sekali dengan yang ada di keraton, selain karena Pakualaman muncul dari sebagian wilayah Kasultanan, para penguasa yang ada di Pakualaman juga masih sedarah dengan para kerabat keraton.

Wilayah Pakualaman meliputi Kabupaten Brosot, yang ada di Kulon Progo, terdiri dari Galur, Tawangrejo, Tawangsoaka, Tawangkarto dan di tambah sebagian kecil wilayah Ibukota Yogyakarta, yang terletak di timur sungai Code yang dijadikan pusat pemerintahan Pakualaman. Wilayah Pakualaman yang berada di daerah Yogyakarta merupakan suatu wilayah dataran rendah, yang dari segala arah berbatasan langsung dengan daerah-daerah kekuasaan keraton Yogyakarta. Daerah perbukitan, dataran rendah, pantai dan rawa merupakan jenis topografi daerah Pakualaman yang ada di Adikarto. Penduduk Pakualaman sudah cukup padat dibuktikan dengan adanya pendataan penduduk pada tahun 1922,

penduduk Pakualaman sudah mencapai 5.000 lebih, baik yang di wilayah Yogyakarta maupun yang di Adikarto. Banyak penduduk Pakualaman kesehariaannya bermata pencaharian sebagai petani. Namun seiring perkembangan perekonomian masyarakat Pakualaman, pekerjaan bertani mulai ditinggalkan, mereka beralih ke pekerjaan lain yang dinilai lebih menguntungkan masyarakat seperti pedagang, tukang kayu, pengrajin bambu, pengrajin batik, pengrajin tekstil dan sebagai tukang jagal hewan.

Pengenalan pendidikan di Pakualaman diawali dengan pendidikan dengan sistem tradisional. Biasanya pelajarannya tentang agama yang dapat di praktikan di kehidupan sehari-hari mereka. Dibangunnya beberapa sekolah yang didirikan pemerintah dengan sistem Barat, masyarakat mulai mengenal sistem Barat, terutama untuk keluarga Pakualaman. Tahun 1891 sudah banyak keluarga Pakualaman yang mulai masuk ke sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan sistem Barat. Mereka juga sempat melanjutkan sekolah mereka dari sekolah dasar sampai ke sekolah tinggi di luar negeri.

Setelah mereka lulus, mereka kembali ke Pakualaman dan mendirikan sekolah partikelir baik di wilayah Pakualaman yang ada di Yogyakarta dan di Adikarto. Sekolah yang terletak di wilayah Pakualaman yang di Yogyakarta bernama sekolah Surjengdjuritan Lor dan Padmosekarnan, sedangkan sekolah yang ada di Adikarto adalah sekolah Ongko Loro yang khusus disediakan untuk anak-anak dari pegawai Pakualaman yang nantinya dipersiapkan untuk menjadi Lurah dan perangkat desa. Sekolah tersebut terlepas dari campur tangan pemerintah, jadi pihak Pakualaman berhak penuh atas segala urusan yang

bersangkutan dengan sekolah tersebut. Dalam perkembangannya, setelah Pemerintah mengetahui sekolah partikelir yang ada dapat berkembang dengan pesat, lalu pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur adanya sekolah partikelir yang mulai banyak bermunculan, salah satunya sekolah yang didirikan Pakualaman. Sejak saat itulah pemerintah mulai mencampuri dan mengawasi sekolah partikelir yang ada di Pakualaman.

Sekolah partikelir yang didirikan Pakualaman baik yang di wilayah Yogyakarta maupun yang di Adikarto, tentu saja sudah membawa banyak dampak dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat Pakualaman. Adanya sekolah ini bisa menambah angka jumlah anak-anak pribumi sekitar Pakualaman yang telah mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan dengan sistem Barat. Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat Pakualaman dengan diperolehnya beberapa keahlian yang didapatkan dari sekolah partikelir tersebut, tentu saja membuka lebar peluang pekerjaan untuk masyarakat, baik itu dari pemerintah Pakualaman sendiri juga banyak dari pemerintah kolonial Belanda.

Lebih terbukanya kesempatan pekerjaan bagi masyarakat Pakualaman tersebut, tentu saja telah mengurangi jumlah pengangguran yang ada di wilayah Pakualaman. Pekerjaan di instansi pemerintah dianggap lebih menjamin kehidupan masyarakat, karena gaji atau upah yang di dapatkan lebih besar bila dibandingkan dengan penghasilan mereka sebelumnya yang hanya menjadi petani. Selain itu, pekerjaan ini juga dapat meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Dengan bekerja di instansi suatu lembaga tertentu, orang tersebut

dipandang masyarakat derajatnya akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan seseorang yang bekerja di bidang pertanian.

Selain adanya dampak dan pengaruh positif di kehidupan masyarakat Pakualaman, terdapat pula pengaruh negatif yang disebabkan dengan adanya pendidikan dengan sistem Barat tersebut. Seiring perkembangan pendidikan Barat yang diberikan di sekolah partikelir Pakualaman, terjadi pergeseran dari fungsi dan tujuan awal dibangunnya sekolah partikelir tersebut. Sekolah partikelir di Pakualaman dibangun untuk mengenalkan pada masyarakat Pakualaman tentang pendidikan dengan sistem Barat, selain itu sekolah partikelir dibangun juga untuk meningkatkan pendidikan masyarakat Pakualaman. Tentu saja dengan pengenalan dan peningkatan pendidikan diharapkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan di sekolah partikelir dengan menggunakan sistem Barat tujuannya hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan pekerjaan di instansi pemerintah dan lainnya. Bukan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, dan membentuk kepribadian yang baik, sehingga tidak mau di jajah oleh Belanda. Masyarakat mulai meninggalkan kebudayaan Jawa yang selama ini sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat cenderung mulai terpengaruh dengan kebudayaan ke-Barat-baratan yang tentu saja tidak sesuai dengan budaya Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Terbitan Resmi

Arsip Puro Paku-Alaman No. 2130. Berisi peraturan pengawasan sekolah partikelir tahun 1934

Arsip Puro Paku-Alaman No 2140. Berisi tentang pendirian sekolah tahun 1928

Arsip Puro Paku-Alaman No. 2153. Berisi tentang penyediaan alat-alat yang digunakan di sekolah untuk proses belajar mengajar

Arsip Puro Paku-Alaman No. 2304. Berisi tentang keadaan pendidikan di Paku-Alaman dan kawontenan abdi dalem

Arsip Puro Paku-Alaman No. 2323. Berisi tentang pengawasan sekolah, subsidi, pendirian, penyediaan buku, dan perbatasan jumlah buku

Buku

Abdurachman Surjomiharjo, *Sejarah Perkembangan Sosial Kota Yogyakarta*, Yogyakarta : Yayasan untuk Indonesia. 2006

_____, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.

Bambang Suwondo, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: DEPDIBUD, 1977.

Baudet, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1987

Breman, *Djawa: Pertumbuhan Penduduk dan Struktur Demografis*, Jakarta: Bhratara, 1971

Burger. D. H, *Perubahan-perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Bhratara, 1977

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- _____, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- _____, *Sejarah daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Depdikbud, 1997.
- Djoko Dwiyanto, *Puro Pakualaman: Sejarah, Kontribusi dan Nilai Kejuangan*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009.
- Djumhur. I, *Sejarah Pendidikan*, Bandung: CV Ilmu, 1970.
- Helius Syamsudin, *Metodologi Sejarah*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Ilmi Albadiyah, *Puro Pakualaman Selayang Pandang*, Yogyakarta: DEPDIBUD, 1984.
- Johan Makmur, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*, Jakarta: DEPDIBUD, 1993.
- Kementrian Penerangan RI, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Kementrian Penerangan RI, 1953.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogya: Tiara Wacana, 1994.
- Mestoko, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Menyusun UU No. 02/1989*, Jakarta : INIS, 2004.
- Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- PEMDA DIY, *Kota Jogjakarta 200 tahun (7 Oktober 1956-7 Oktober 1956)*, Kota Praja Jogjakarta, 1956.
- Poerwokoesoemoe Soedarisman, *Kadipaten Pakualaman*, Yogyakarta: Gadjah Mada UP, 1985.
- Said, *Pendidikan Abad ke-20 dengan Latar Belakang Kebudayaan*, Jakarta: Mutiara, 1981.

- Sartono Kartodirjo, *Sejarah Nasional Indonesia V*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.
- _____, *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- _____, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 (dari Emporium Sampai Imperium)*, Jakarta: Gramedia, 1987.
- _____, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*, Jakarta: PT gramedia, 1990.
- Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981.
- Soeratman, *Perguruan Swasta*, Yogyakarta: Majelis Persatuan Taman Siswa, 1981.
- Soetedja Bradjanagara, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Yogyakarta: t.p, 1982.
- Sri Sutjianingsih, *Sejarah Pendidikan DIY*, Yogya: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981.
- Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan pendidikan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Sutari Imam Banardib, *Sejarah Pendidikan*, Yogya: Andi Offset, 1955.
- Tauchid Mochammad, *Perguruan Partikelir*, Yogya: Majelis Luhur Persatuan Tamsis, 1955.
- Vitalis Djebras., *Mengapa Sekolah Partikelir?*, Ende: Arnolus, 1963
- Wasty Soemanto, *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*, Surabaya: USAHA NASIONAL, 1983
- Wuryanto Abdullah, *Geografi Budaya dalam Wilayah Pembangunan daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: DEPDIKBUD, 1976
- Zahara Idris, *Dasar-dasar Kependidikan*, Padang: Angkasa Raya, 1981

Majalah:

Karina Supeli, “Jepara: Sekolah Rakyat”, *Basis*: Balai Desa balong, 2008, hlm. 54

Kartono, Sastrodirjo, “Sekolah kebangsaan, Sekolah Rakyat Pancasila”, *Basis*, 2009, hlm.41.

Kristianto E, “Pendidikan di Daerah”, *Basis* 1984,hlm.33

Koentjaraningrat, Kumpulan karangan : Ikhtisar Sejarah Pendidikan di Indonesia dan Perubahan Orientasi Nilai Budaya Indonesia, 1982, hlm. 409

Mangan, J, “Pengaruh Sekolah pada masyarakat Tradisional di Indonesia”, *Prisma* 1986, hlm. 09.

Skripsi

Normi Sholikhah, “Perkembangan Sekolah katolik di Yogyakarta (1917-1940)”, *Skripsi*, Yogyakarta : UNY, 2005.

Parinem, “Perkembangan Pendidikan di Adikarto Tahun 1900-1942”, *Skripsi*, Yogyakarta : UNY, 2003.

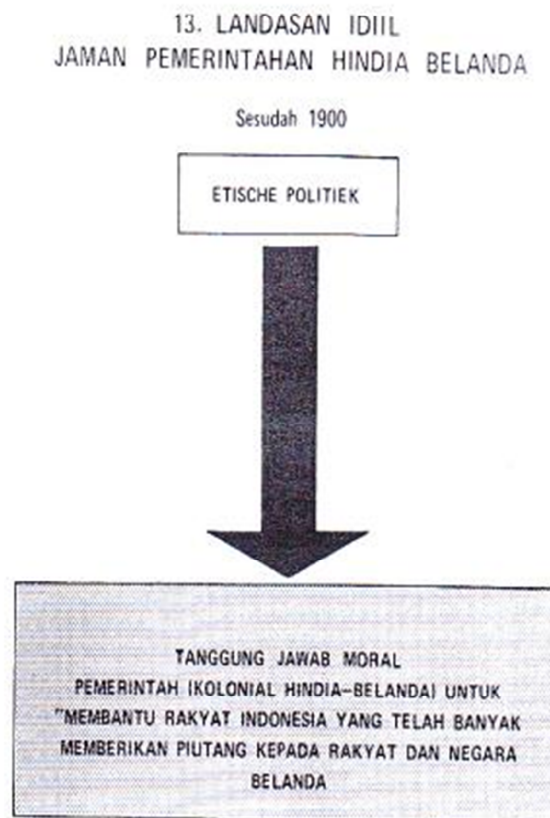
Sedianto Setio, “Kerabat Pakualaman Dalam Pendidikan 1864-1930”, *Skripsi*, Yogyakarta : UGM, 1983.

Internet

Soeraji, *Kadipaten Pakualaman*, pada [http : // www.google.com/Kadipaten](http://www.google.com/Kadipaten) Pakualaman. Diakses pada tanggal 19 Februari 2012

Suparman, Kaitan Kebudayaan dengan Pendidikan, pada [http://www.google.com/Kebudayaan dan Pendidikan](http://www.google.com/Kebudayaan%20dan%20Pendidikan). Diakses pada tanggal 20 Maret 2012

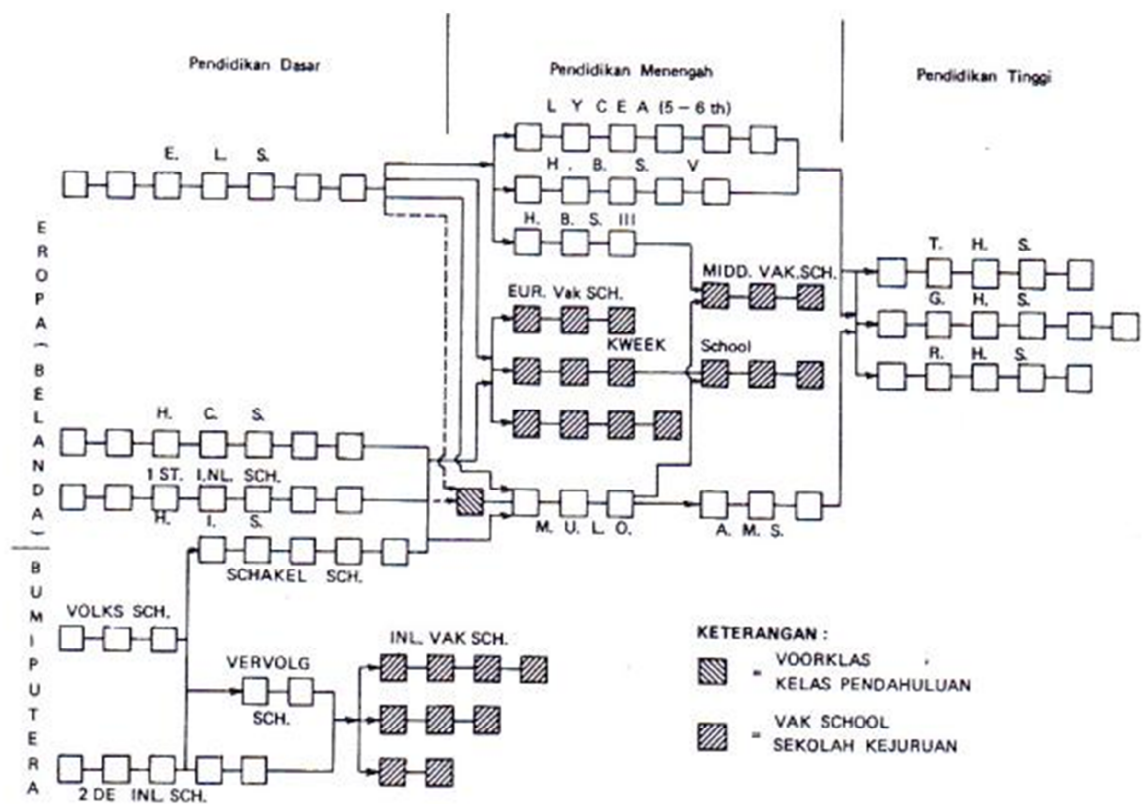
Lampiran 01 : Landasan Idiil Jaman Pemerintahan Hindia Belanda



Sumber : DEPDIKBUD, Pendidikan di Indonesia 1900-1974, Jakarta : Balai Pustaka, 1976, hlm. 24.

Lampiran 02 : Sistem Persekolahan Jaman Hindia Belanda

17. SISTEM PERSEKOLAHAN JAMAN HINDIA BELANDA



Sumber : *DEPDIBUD, Pendidikan di Indonesia 1900-1974, Jakarta : Balai Pustaka, 1976, hlm 38.*

Lampiran 03 : Isi Perjanjian Giyanti

Perjanjian Giyanti

Berdasarkan perundingan antara pangeran Mangkubumi dan N. hartingh pada tanggal 22 dan 23 September 1754 dan surat persetujuan dari Sri Sunan Paku Buwono III tanggal 4 November 1754 itu, maka dapatlah ditandatangani perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, yang kurang lebih berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan hamengku Buwono Senopati Ingalaga ngabdurachman Sajidin Panotogomo Kalifatullah di atas separo dari Kerajaan Mataram, yang diberikan kepada beliau dengan hak turun-temurun pada warisnya, dalam hal ini pangeran Adipati Anom Bendoro Raden mas Soendoro.

Pasal 2

Akan senantiasa diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan Kumpeni dengan rakyat Kasultanan

Pasal 3

Sebelum pepatih Dalem (Rijks-Bestuurder) dan para Bupati mulai melakukan tugasnya masing-masing, mereka harus melakukan sumpah setia pada Kumpeni di tangan Gubernur

Pasal 4

Sri Sultan tidak akan mengangkat/memberhentikan Papatih Dalem dan Bupati, sebelum mendapatkan persetujuan dari Kumpeni.

Pasal 5

Sri Sultan akan mengampuni para Bupati yang selama dalam peperangan memihak Kumpeni.

Pasal 6

Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas pulau Madura dan daerah-daerah pesisiran, yang telah diserahkan oleh Sri Sunan Paku Bwono II kepada Kumpeni dalam Contract-nya pada tanggal 18 Mei 1746. Sebaliknya Kumpeni akan memberi ganti rugi kepada Sri Sultan sebesar 10.000 real tiap tahunnya.

Pasal 7

Sri Sultan berjanji akan memberi bantuan pada Sri Sunan Paku Buwono III sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 8

Sri Sultan berjanji akan menjual kepada Kumpeni bahan-bahan makanan yang diperlukannya dengan harga tertentu.

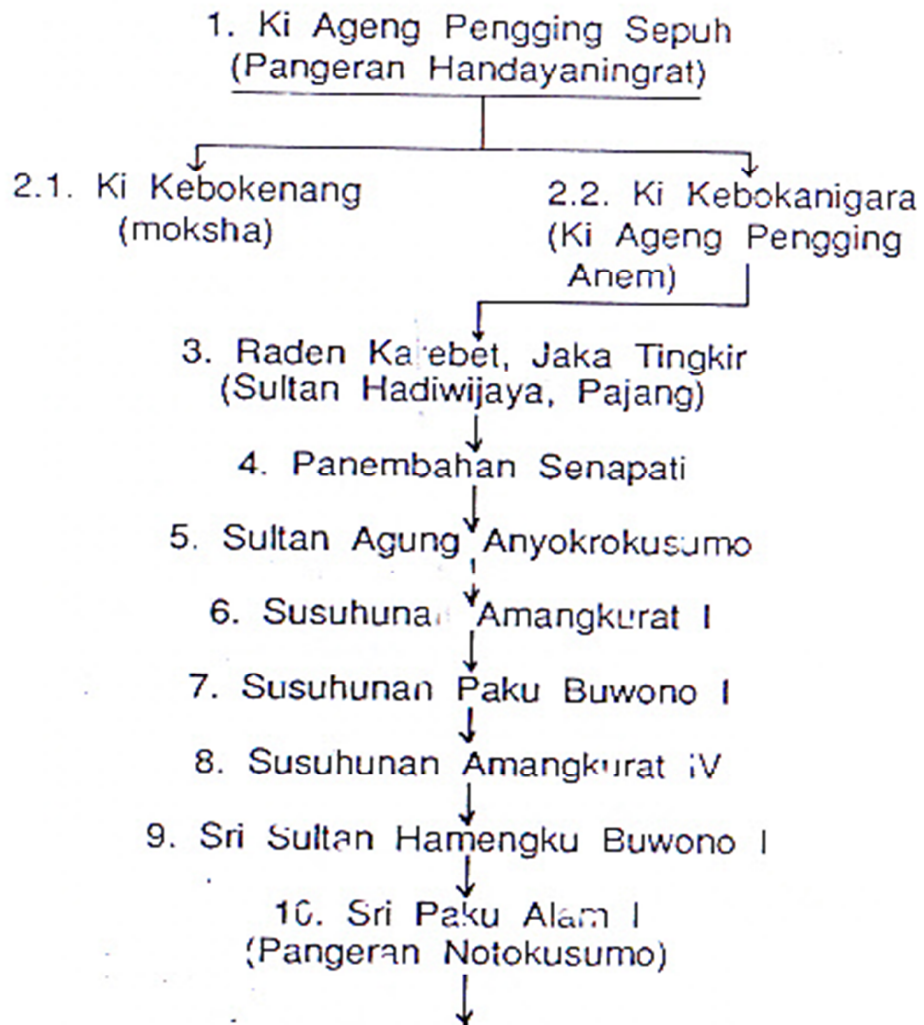
Pasal 9

Sri Sultan berjanji akan menaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara raja-raja Mataram yang terdahulu dengan Kumpeni, teristimewa perjanjian-perjanjian dalam tahun 1705, 1733, 1743, 1746 dan 1749.

Perjanjian ini dari pihak Kumpeni ditandatangani oleh N. Hartingh, W. van Ossenberch, J.J. Steenmulder, C. Donkel dan W. Fockens.

Sumber : Soedarisman. Poerwokoesoemo, Kadipaten Pakualaman, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1985), hlm. 05

Lampiran 04 : Silsilah Keluarga Pakualaman



Sumber : Buku Peringatan Ulang Tahun Sampeyan Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VII (84 th)

Lampiran 05 : Isi Kontrak Politik antara Paku Alam I dan Gubernemen Inggris 17
Maret 1813

KONTRAK POLITIK

Adapun bunyi Politik Kontrak antara Sri Pakua Alam I dengan gubernemen Inggris pada tanggal 17 Maret 1813 adalah sebagai berikut :

“Perjanjian yang dibuat antara John Crawfurd Residen Yogyakarta, untuk itu diberikan kuasa penuh oleh Thomas Stamford Rafles, Letnan Gubernur jemdral dari pulau Jawa dan sekitarnya di satu pihak dan Pangeran paku Alam di pihak lain:

Pasal 1

Karena gubernemen Inggris sepenuhnya yakin tentang kesetian dan jasa-jasa Pangeran Paku Alam, maka gubernemen Inggris akan memberi perlindungan secara langsung kepada Sri Paku Alam dan keluarganya.

Pasal 2

Gubernemen Inggris berjanji, selama Pangeran Paku Alam bersikap sesuai keinginan Inggris, gubernemen akan memberikan tunjangan bulanan kepada Sri Paku Alam sebesar 750 real seumur hidup, dan gubernemen Inggris akan menguasai agar Sri Sultan Hamengku Buwono III memberi tanah kepada Sri Paku Alam sebesar 4.000 cacah, dan tunjangan bulanan dan tanah tersebut setelah Sri Paku Alam meninggal akan dialihkan pada puteranya yang tertua Pangeran Suryangingrat.

Pasal 3

Pemberian tanah kepada Sri Paku Alam itu akan tetap dijamin oleh gubernemen Inggris, dan tanah itu akan diatur serta diperintah sesuai dengan kehendak gubernemen Inggris.

Pasal 4

Di daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Sri Paku Alam, tidak akan di pungut pajak-pajak baru, dan penghasilan tanahnya tidak boleh ditambah atau dirubah, kecuali jika sudah mendapatkan izin terlebih dahulu dari gubernemen Inggris.

Pasal 5

Sri Paku Alam berjanji untuk memelihara korps dragonders sebanyak 100 orang untuk kepentingan gubernemen Inggris, berdasarkan syarat-syarat seperti diatur dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 6

Korps tersebut dipersenjatai dan diberi seragam oleh gubernemen Inggris, sedangkan Sri Paku Alam mengurus kuda dan perlengkapannya.

Pasal 7

Sri Paku Alam berjanji, kecuali akan memberi masukan kepada korps juga memberi gaji bulanan sebagai berikut :

Sersan	3	real
Kopral	2½	real
Serdadu	2	real

Pasal 8

Korps secara teratur akan dilatih dengan pelatih dari Inggris yang diangkat sudah ditugaskan untuk melatih dan tidak akan ada serdadu yang dapat dipecat oleh Sri Paku alam tanpa izin gubernemen Inggris.

Pasal 9

Pada akhirnya ditentukan bahwa kecuali korps di atas Sri Paku Alam atau keluarganya dengan alasan apapun juga tidak diperkenankan untuk memelihara atau mengerahkan sebuah pasukan militer.

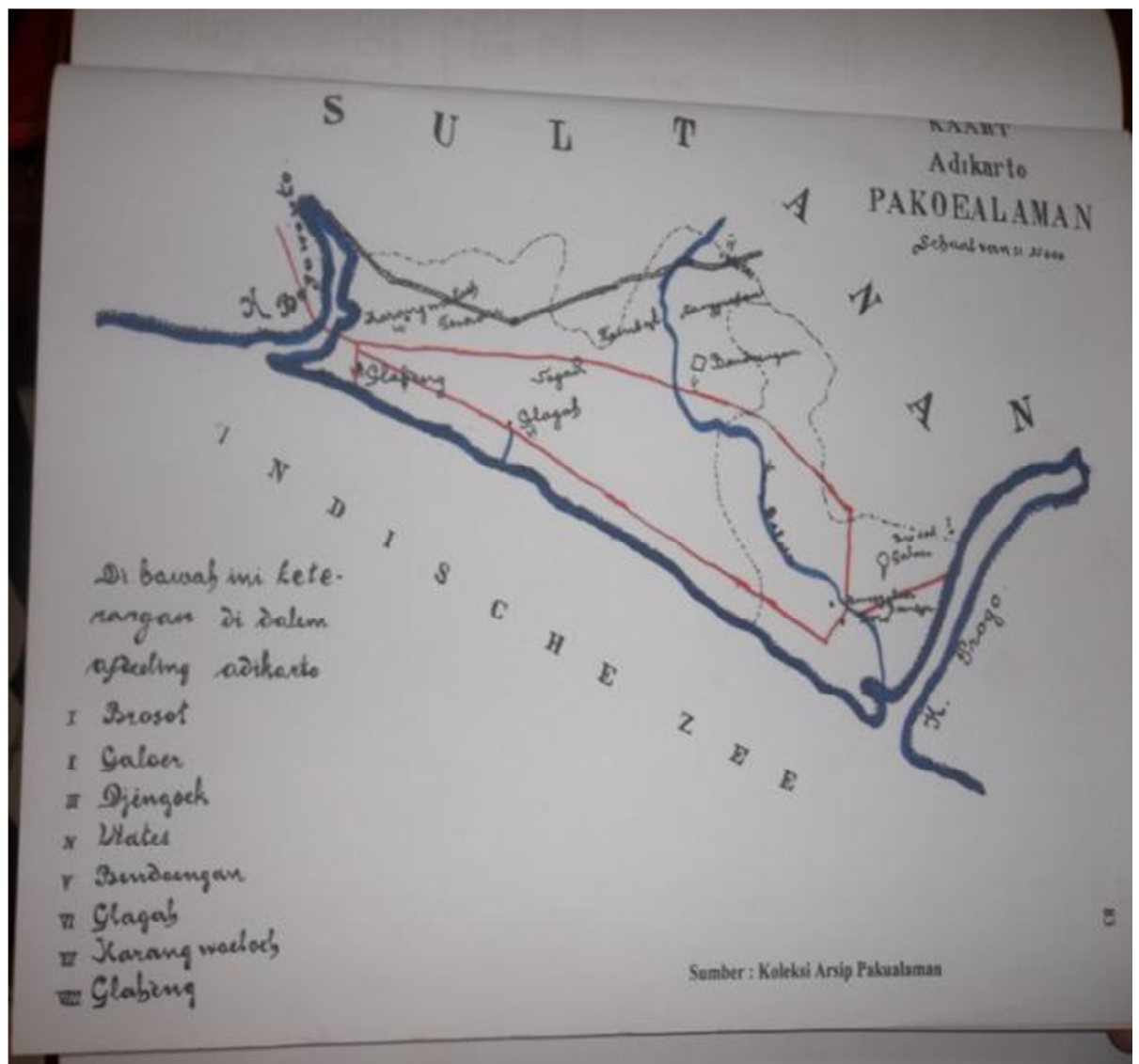
Ditandatangani, dibubuhi segel dan dibuat di Yogyakarta pada tanggal 17 Maret
1813.

Tertanda

(J. Crawford)

Sumber : Soedarisman. Poerwokoesoemo, *Kadipaten Pakualaman*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 149.

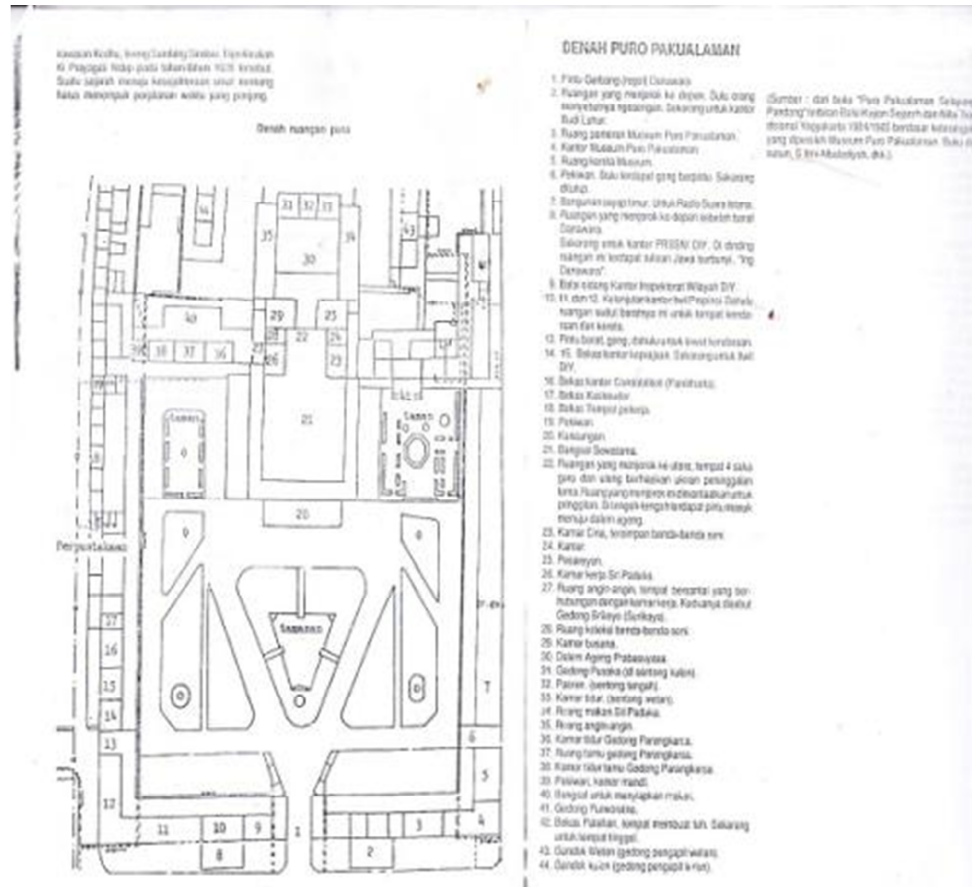
Lampiran 06 : Peta Daerah Adikarto



Sumber : Koleksi Arsip Puro Pakualaman

Lampiran 07 : Denah Puro Pakualaman

Denah Puro Pakualaman



Sumber : : *Buku Peringatan Ulang Tahun Sampeyan Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VII (84 th), hlm. 02*

Lampiran 08 : Tarif Sekolah Pakualaman

Tarif Sekolah Pakualaman

Schoolgeldtarief van de Pakoe Alamsche Volksscholen.

Voor leerlingen waarvan het inkomen van ouders of voogden een inkomen hebben

van	f 25.- en hooger	per maand	f 0,40	per maand	1e Catagorie
van	" 15.- tot f 25.-	per maand	f 0,25	per maand	2e Catagorie
van	" 10.- tot " 15.-	"	" 0,10	"	3e Catagorie
van	" 5.- tot " 10.-	"	" 0,05	"	4e A "
van	beneden f 5.-	"	gratis		4e B "

Sumber : Seranai Arsip Pakualaman Nomer 2153

Lmpiran 09 : Gaji Guru di Sekolah Pakualaman

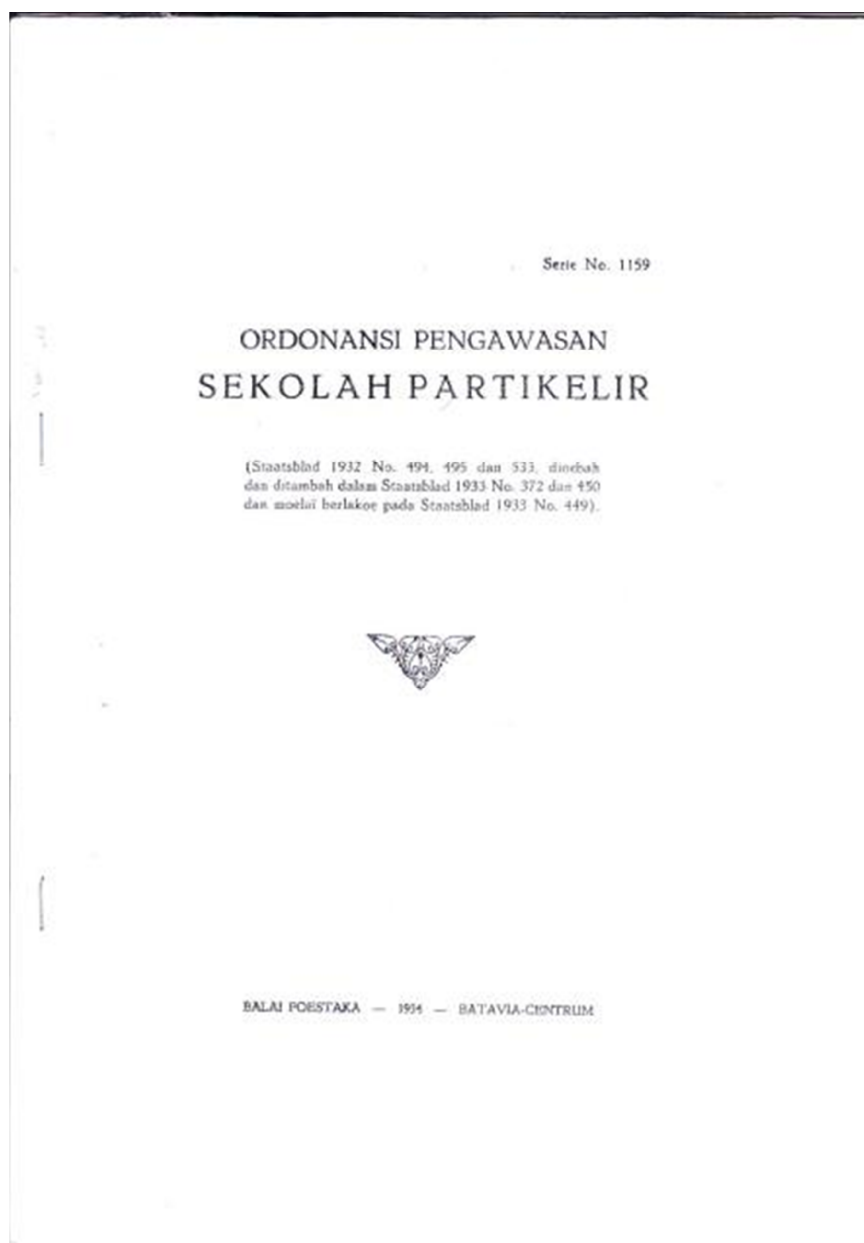
Gaji Guru di Sekolah Pakualaman

PAKOE - ALAMGCHENIJK.							
Naam der leerkracht tan	Hoofd of Hulp	Diensttijd op		Salaris	Datum eerst volgende verhoging	School- geld in Augustus 1936	Aanteekeningen
		1-1-1936 op 1-1-1936					
		Jaar	Maand				
Sardjowardojo	Hfd	19	3	f 24	1-5-'38	f 9.40	
Paizan	hlp	18	6	f 19	1-4-'39		
Salim Siwohardjono	hlp	-	-	f 10.-	1-8-'39		
Soemsoekarto	Hfd	27	2	f 27.50	-	f 4.80	
Tuekidjo	hlp	2	4	f 11.-	1-4-'38		
Madroen Mangkoesiwojo	Hfd	19	5	f 24.-	1-3-'38	f 7.08	
Soekardi	hlp	2	4	f 11.-	1-4-'38		
S.Martosodirdjo	Hfd	28	-	f 27.50	-	f 12.38	
Djenal	hlp	24	1	f 21.-	1-7-'39		
R.W.Karelsoedarmo	hlp	23	3	f 20.-	1-5-'37		
R.Sahid Martosodewo	Hfd	20	-	f 24.-	1-8-'37	f 12.41	
S.Martosetatojo	hlp	2	11	f 11.-	1-9-'37		
S.Martosoejoed	hlp	1	11	f 10.-	1-9-'36		
Sardjo-oetomo	Hfd	27	7	f 27.50	-	f 7.09	+1 Beroemd tot hlp. n. 1 v. 1 Aug. '38
Pratiostmodjo	hlp	4	-	f 12.-	1-8-'38		
S.M.Soemostmodjo	Hfd	24	4	f 26.-	1-4-'39	f 13.10.	
Sediman Tjokrosiwojo	hlp	25	7	f 21.-	1-6-'38		
Soeradjiman	hlp	24	4	f 21.-	1-4-'39		
S.Atmowilogo	Hfd	25	10	f 26.-	1-10-'37	f 14.93	
Tjiptohardjo	hlp	21	2	f 20.-	1-6-'39		
Sjoewihardjo	hlp	24	4	f 21.-	1-4-'39		

Jogjakarta 18 September 1936
Zelfbestuurschoolopziener verlof
De Adj.Schoolopziener
W.O.-----

Sumber : Seranai Arsip Puro Pakualaman Nomer 2153

Lampiran 10 : Ordonasi Pengawasan Sekolah Partikelir



Lampiran 11 : Pembagian Penduduk Masa Kekuasaan Pemerintah Belanda

Pembagian Penduduk Masa Kekuasaan Pemerintah Belanda

Pembagian penduduk menurut hukum tahun 1848

1. Golongan Eropa
2. Golongan yang dipersamakan dengan Eropa (bangsawan)
3. Golongan Bumi putera
4. Golongan yang dipersamakan dengan Bumi putera

Pembagian penduduk menurut hukum tahun 1920

1. Golongan Eropa
2. Golongan Bumi putera
3. Golongan Timur Asing

Pembagian penduduk menurut keturunan atau status sosial

1. Golongan Bangsawan (Aristokrat) dan pemimpin adat
2. Pemimpin agama (ulama)
3. Rakyat biasa (jelata)

Sumber : Ary Gunawan, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan*, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 1986), hlm. 09.